



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 14 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas, sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 di diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RKPD

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2021.
 - (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Perencanaan Pemerintahan daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah daerah dan hasil Evaluasi rencana kerja pemerintah daerah triwulan II Tahun 2021.
 - (3) Perubahan RKPD Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun dengan sistematika :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP
 - (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2021 yang disusun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan :
 - a. perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sementara tahun anggaran 2021;
 - b. rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021; dan
 - c. perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

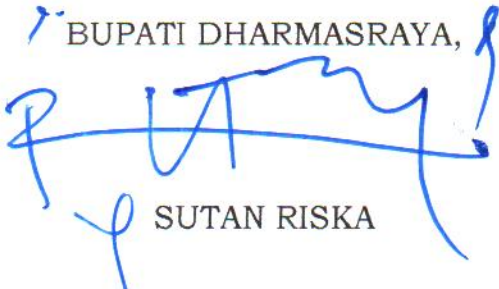
Dalam rangka penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 perangkat daerah wajib menggunakan perubahan RKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Agustus 2021



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR..15..

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA	
Oleh BAGIAN HUKUM	
KABUPATEN DHARMASRAYA	
TANGGAL	TAMBAH TANGGAL
	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4. Sistematika Penulisan RKPD	I-5
1.5. Maksud Dan Tujuan	I-9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2021	
2.1. Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2021	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Tahun 2021	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-4
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-4
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-6
4.1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya	IV-11
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	IV-16
4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV-16
4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-17
4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	IV-25
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	II-3
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (jiwa)	II-5
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	II-6
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	II-8
Tabel 2.5	Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-9
Tabel 2.6	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (PDRB ADHK 2010) KAbupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018)	II-10
Tabel 2.7	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018 (ADHK Tahun 2010)	II-11
Tabel 2.8	Indeks Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumbar dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-13
Tabel 2.9	Perkembangan Inflasi Nasional, Provinsi Sumbar, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Tahun 2014 s/d 2018	II-12
Tabel 2.10	PDRB Pendapatan Perkapita Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 201 s/d 2018	II-13
Tabel 2.11	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-14
Tabel 2.12	Capaian AMH, Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, APK dan APM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-16
Tabel 2.13	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tahun 2014 s/d 2018	II-18
Tabel 2.14	Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-18
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-20
Tabel	Perkembangan Ruang Kelas Pendidikan dengan	

2.16	Kondisi Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	
Tabel 2.17	Angka Kematian Balita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-22
Tabel 2.18	Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-22
Tabel 2.19	Prevalensi Stunting Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-23
Tabel 2.20	Persentase Puskesmas Terakreditasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-23
Tabel 2.21	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-24
Tabel 2.22	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-24
Tabel 2.23	Cakupan Pelayanan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-25
Tabel 2.24	Cakupan Penanganan Penderita Hipertensi dan Penderita Diabetes Melitus (golongan umur >15 tahun keatas)	II-25
Tabel 2.25	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.26	Cakupan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.27	Indikator Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-26
Tabel 2.28	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-27
Tabel 2.29	Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Pemerintah yang Berwewenang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018	II-28
Tabel 2.30	Rasio Nagari yang Sudah Dilalui Jalan Baik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-29
Tabel 2.31	Persentase Jalan Lengkap Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-29
Tabel	Akses Air Minum Layak Kabupaten Dharmasraya	II-29

2.32	Tahun 2014 s/d 2018	
Tabel 2.33	Akses Sanitasi Layak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-30
Tabel 2.34	Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-30
Tabel 2.35	Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-31
Tabel 2.36	Indikator Bidang Sosial Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-32
Tabel 2.37	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-33
Tabel 2.38	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-34
Tabel 2.39	Indikator Bidang Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-34
Tabel 2.40	Indikator Bidang Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-35
Tabel 2.41	Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-36
Tabel 2.42	Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-37
Tabel 2.43	Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-38
Tabel 2.44	Indikator Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-39
Tabel 2.45	Indikator Bidang Perhubungan 2014 s/d 2018	II-40
Tabel 2.46	Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-41
Tabel 2.47	Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-42
Tabel 2.48	Nilai Realisasi dan Jumlah Berskala Nasional Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-42
Tabel 2.49	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-43
Tabel 2.50	Indikator Bidang Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-44
Tabel 2.51	Indikator Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-44
Tabel 2.52	Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-45

Tabel 2.53	Indikator Bidang Kearsipan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-46
Tabel 2.54	Indikator Bidang Pariwisata Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-47
Tabel 2.55	Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (ADHK) Tahun 2014 s/d 2018	II-47
Tabel 2.56	Produksi dan Produktivitas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-48
Tabel 2.56	Indikator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015	II-52
Tabel 2.57	Produksi dan Produktivitas Komoditi Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-49
Tabel 2.58	Produksi dan Populasi Ternak Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-50
Tabel 2.59	Indikator Bidang Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-51
Tabel 2.60	Indikator Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-52
Tabel 2.61	Indikator Bidang Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-52
Tabel 2.62	Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-53
Tabel 2.63	Indikator Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-53
Tabel 2.64	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s/d 2018	II-55
Tabel 2.65	Permasalahan Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan Indikator Pembangunan	II-59
Tabel 3.1	Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2016 s/d 2018 dan Prediksi tahun 2019 s/d 2020	III-2
Tabel 3.2	Kondisi Ekonomi Makro Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2018 dan Prediksi tahun 2019 s/d 2020	III-3
Tabel 3.3	Proyeksi Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	III-4
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-5
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-11
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-12
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2021	III-12
Tabel 3.7	Defisit Rill Anggaran Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 s/d 2015	III-23
Tabel 4.1	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	IV-8

Tabel 4.2	Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-17
Tabel 4.3	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/sasaran Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021	IV-23
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV-27
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	IV-27
Tabel 4.6	Tema Pembangunan Nasional, Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya	IV-35
Tabel 4.7	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	IV-36
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah	IV-37
Tabel 4.9	Kesesuaian Prioritas Nasional, Program Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat, Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas dan Program Prioritas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	IV-39
Tabel 5.1	Rekap Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020	V-2
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	VI-2
Tabel 6.2	Realisasi dan Proyeksi Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021	VI-8
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 - 2021	VI-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Potensi Pengembangan Wilayah	II-1
Gambar 2.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018 (ADHK Tahun 2010)	II-11
Gambar 2.3	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014-2018	II-15
Gambar 2.4	Kerangka Pembangunan Daerah Berdasarkan Pendekatan Pemeliharaan, Pemupukan dan Pengembangan Modal Daerah (Assets- Based Development)	II-58
Gambar 4.1	Strategi Pembangunan Nasional	IV-7

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

RKPD tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya merupakan pelaksanaan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan. Hal ini juga dipertajam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa RKPD dapat dirubah apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Pandemi Covid-19 yang melanda hingga tahun 2021 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah. Realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk penanganan tanggap darurat pandemi Covid-19 dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak. Dengan memperhatikan amanat peraturan tersebut dan kondisi darurat akibat Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Semester I RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap RKPD tahun 2021 guna menyesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga prioritas pembangunan di daerah dapat terus terjaga serta penyesuaian terhadap perubahan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta memanfaatkan seoptimal mungkin sisa saldo anggaran lebih tahun anggaran 2020 yang telah diaudit untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA Tahun 2021, dan Perubahan PPAS Tahun 2021, Perubahan Renja PD selanjutnya menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 dan menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 serta pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah sebagai alat untuk menjamin serta meningkatkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai alat dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Dampaknya;
20. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaringan Pengamanan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam mewujudkan sinergi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Kabupaten Dharmasraya dengan berbagai dokumen terkait lainnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perubahan RKP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 mempedomani, mengacu serta melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan terkait, baik dokumen perencanaan nasional, provinsi maupun dokumen perencanaan kabupaten, diantaranya :

- mempedomani dokumen : RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, terutama prioritas pembangunan tahapan keenam tahun keempat (2021-2025)
- penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, terutama dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2019
- Mengacu dokumen : RKP Tahun 2021 dan Perubahan RKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
- menelaah dokumen penataan ruang : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031
- Dokumen perencanaan dan kajian lainnya

Gambar 1.1.
Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Dalam penyusunan Perubahan RKP Kabupaten Dharmasraya ada 4 (empat) dokumen utama yang menjadi input selama proses penyusunan berjalan, diantaranya 3 dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, serta dokumen perencanaan penataan ruang, yaitu RTRW Kabupaten Dharmasraya yang dijadikan

sebagai bahan telaahan khususnya input dalam penyusunan gambaran umum daerah, penyusunan program/kegiatan bidang penataan ruang serta arah kebijakan dalam perizinan dan penanaman modal. RKPD tidak terlepas juga dari dokumen lainnya yang menjadi masukan dalam penyusunannya, baik dokumen rencana yang bersifat komplementer (Rencana aksi daerah/RAD dan masterplan,) maupun berbagai dokumen kajian lainnya yang pernah dilakukan.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan RKPD, kedudukan perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta keterkaitan antara dokumen perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD serta rancangan perubahan RPJMD.

1.2 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian tentang dasar hukum yang digunakan dalam Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2021.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1 Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dan provinsi dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen Perubahan RPKD Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2021.

3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

3.2.3 Perubahan kebijakan Pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran Perubahan RKPD tahun 2021 dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2021 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan Perubahan RKPD tahun 2021, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan penjelasan singkat tentang kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan perubahan APBD tahun 2021.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 CAPAIAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TRIWULAN II

Capaian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2021 dilakukan melalui pengukuran kinerja berdasarkan target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase. Secara umum, persentase pencapaian kinerja pembangunan daerah dihitung dengan rumus yang hasilnya mengandung pengertian bahwa semakin tinggi persentase menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja program/kegiatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat lebih rinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 (terlampir).

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Kondisi ekonomi daerah memuat penjelasan tentang data ekonomi makro dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: nilai PDRB, PDRB perkapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta struktur PDRB ditinjau secara sektoral.

Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2019 dan proyeksi tahun 2020 s/d 2022

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi tahun 2021**		Proyeksi Tahun 2022**
		2018	2019	2020	Sebelum covid-19	covid-19	
1	Nilai PDB ADHB (miliar rupiah)	9,282,383.18	9,917,019.28	10.863.603,7	11.322.720,3	11.322.720,3	
2	PDB Perkapita ADHB (rupiah)	41,052,193	41,809,776.23	40.48	42.500.000	44,51	46,24
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6.42	6.29	6,23	5,85	6,36	6,24
4	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.32	4.95	-1.39	4,17	2,89	3,09
5	Gini Rasio	0.26	0.28	0,28	0,266	0,273	0,272
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	3,94	5,08**	5,31	7,38	5,06	4,95
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.86	71.52	71,51	72,19	71,84	72,16

Sumber : * Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021, dan Proyeksi Bappeda Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat meningkatnya nilai PDRB ADHB dari tahun 2018 ke 2020, menggambarkan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat yang mewakili 17 sektor dalam perhitungan PDRB. Dengan optimalisasi program-program pemulihan ekonomi nasional secara konsisten diperkirakan perekonomian nasional dan domestik akan membaik dan didukung percepatan program vaksinasi Covid-19 serta disiplin protokol kesehatan ekonomi kabupaten Dharmasraya diperkirakan akan tumbuh positif. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh 2,89 persen dan meningkat 3,09 persen tahun 2022.

3.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam menjelaskan dan menganalisis Perubahan Kebijakan Pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 berpedoman pada Permendagri No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan mempedomani arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan nasional, maupun kondisi perekonomian daerah dampak pandemi Covid-19 selama tahun 2021. Pada bagian ini dijelaskan tentang perubahan target pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2019 dan tahun 2020 serta perkiraan realisasi tahun 2021, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan yang mendukung pengelolaan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendorong peningkatan PAD kedepannya.

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, diantara usaha yang dilakukan adalah dalam bentuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dengan memberi penyederhanaan dalam sistem dan prosedurisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan diantaranya adalah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kebijakan dikarenakan perubahan proyeksi PAD, selain itu juga terjadi perubahan kebijakan pada lain-lain PAD yang sah dengan telah ditetapkannya alokasi DAK fisik, non fisik dan penugasan, serta adanya perubahan proyeksi pendapatan BLUD.

b. Pendapatan Transfer

Perubahan Pendapatan transfer dikarenakan adanya penurunan pendapatan transfer pusat pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan proyeksi penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya: pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Berdasarkan realisasi tahun-tahun anggaran sebelumnya, menunjukkan bahwa realisasi PAD telah mampu mencapai target secara optimal sebesar 93,11% persen ditahun 2020, sedangkan untuk dua sumber pendapatan lainnya target yang ditetapkan sudah hampir mencapai 100 persen. Realisasi Pendapatan yang terdiri dari dana perimbangan mencapai 97,55 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 85,62 persen untuk tahun 2020. Seperti terdapat pada tabel di bawah:

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 s/d 2021

No.	Uraian Akun	Realisasi			APBD Awal	Perubahan 2021
		2018	2019	2020	2021	Proyeksi
	PENDAPATAN DAERAH	923.540,95	1.019.358,07	990.191,15	950.959,99	950,283,46
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.116,20	78.882,92	82.877,84	84.116,61	88,257,73
	Pendapatan Pajak Daerah	29.231,34	19.178,96	17.751,81	18.714,13	19,356,63
	Pendapatan Retribusi Daerah	2.655,85	3.054,85	1.866,61	3.073,47	3,108,47
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.177,29	3.590,31	4.063,75	4.063,75	3,524,57
	Lain-lain PAD yang Sah	49.051,72	53.058,79	59.195,67	58.265,25	62,268,05
B	PENDAPATAN TRANSFER	808.465,73	906.775,17	872.426,16	835.392,28	828,524,64
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	708.972,42	761.630,74	731.498,44	795.317,90	779,685,693
	Dana Bagi Hasil Pajak	17.647,99	13.711,56	12.973,43	17.078,47	17,129,78
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.729,96	2.116,62	2.174,08	-	-
	Dana Alokasi Umum	501.889,28	524.888,50	478.355,77	488.047,00	472,416,14
	Dana Alokasi Khusus	187.705,19	220.914,06	237.995,16	216.652,03	216,599,35
	Dana Insentif Daerah (DID)				17.000,34	17.000,34
	Dana Desa				56.540,07	56.540,07
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	60.749,03	97.546,29	99.826,68	-	-
	Dana Penyesuaian	60.749,03	97.546,29	99.826,68	-	-
	TRANSFER ANTAR PEMERINTAH DAERAH	38.744,28	47.598,14	41.101,03	40.074,38	48,838,94
	Dana Bagi Hasil Provinsi	38.744,28	47.598,14	41.101,03	40.074,38	48,838,94
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.959,02	33.699,98	34.887,15	31.451,10	33,501,100,000
	Pendapatan Hibah	30.959,02	33.699,98	34.887,15	500,00	2,550,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				30.951,10	30.951,10

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp. - 676,523,314,- dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penurunan tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi pendapatan yang berasal dari sektor yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Penurunan berasal dari Pendapatan Transfer Sebesar Rp.- 6,867,643,691,- khususnya yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat berupa penurunan alokasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp.- 15,630,853,000,- dan Dana Alokasi Khusus Rp.-1,350,000. Namun pada Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 4,141,120,377,- dan Pos Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.920.432.000,-.

3.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Peran belanja sangat krusial dalam merespon dampak pandemic Covid-19 untuk mendukung upaya pemulihan dan reformasi pada berbagai bidang antara lain kesehatan, program perlindungan social, Pendidikan serta dukungan pada dunia usaha. Kebijakan belanja yang ditempuh antara lain melakukan efisiensi, realokasi dan reconfusing untuk penanganan Covid-19 dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi.

a. Belanja Operasi

perubahan kebijakan belanja operasi dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja hibah.

b. Belanja Modal

perubahan kebijakan terhadap nilai belanja langsung adalah karena adanya penyesuaian setelah adanya perhitungan terhadap jenis-jenis belanja modal yang harus dibayarkan serta perubahan proyeksi nilai pendapatan daerah, sehingga terjadi pengurangan terhadap proyeksi nilai belanja modal

d. Belanja Tidak Terduga

perubahan kebijakan belanja tidak terduga dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap belanja tidak terduga

e. Belanja Transfer

Pada belanja transfer tidak terjadi perubahan belanja

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 s/d 2020

No.	Uraian	Realisasi			APBD Awal	Perubahan 2021
		2018	2019	2020	2021	Proyeksi
	BELANJA DAERAH	931.599,59	1.036.553,41	985.748,84	1,038,476,23	977,503,99
A	BELANJA OPERASI	609.833,42	690.742,58	658.507,03	731,293,22	688,877,645
	Belanja Pegawai	354.371,83	430.141,09	418.043,15	465,348,16	406,538,38
	Belanja Barang dan Jasa	223.663,20	207.300,13	201.504,44	221,767,07	239,898,95
	Bunga					
	Subsidi					
	Hibah	30.837,84	49.451,25	38.795,44	44,177,99	42,440,30
	Bantuan Sosial	194,50	3.132,00	164,00		
	Bantuan Keuangan	766,04	718,11			
B	BELANJA MODAL	215.526,96	226.598,09	195.046,93	191,968,39	177,411,73
	Belanja Tanah	35,30				
	Belanja Peralatan dan Mesin	30.558,56	45.512,22	52.873,40	57,336,38	55,081,78
	Belanja Gedung dan Bangunan	63.559,87	112.232,96	94.052,70	99,633,40	95,379,31
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.802,71	61.210,26	34.663,99	34,521,55	26,367,49
	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.570,52	7.642,65	13.456,83	477,05	583,15
C	BELANJA TAK TERDUGA	744,34	24,18	24.924,27	5.000,00	1.0000,00
	Belanja Tak Terduga	744,34	24,18	24.924,27	5.000,00	1.0000,00
D	BELANJA TRANSFER	105.494,87	119.188,57	107.270,60	110,214,623	110,214,623
	Bagi Hasil Pajak	1.366,44	3.170,65	933,02	2.178,76	2.178,76
	Bantuan Keuangan	104.128,43	116.017,92	106.337,58	108,035,86	108,035,86

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan alokasi pembiayaan dikarenakan dampak pandemik Covid-19 mempengaruhi kebijakan pembiayaan Pemerintah Daerah dalam hal perubahan alokasi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dengan menggunakan nilai SILPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 mengingat adanya penurunan target pendapatan daerah serta penanganan dampak Covid-19.

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 s/d 2021

No	Uraian	Realisasi			APBD Awal	Perubahan 2021
		2018	2019	2020	2021	Proyeksi
III	PEMBIAYAAN					
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Penggunaan SILPA	31.647,42	23.588,79	3.893,45	87,516,24	8,334,42
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.647,42	23.588,79	3.893,45	87,516,24	8,334,42
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	Penyertaan Modal Pem. Daerah	-	2.500,00	-	-	4,461,24
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	2.500,00			4,461,24
	PEMBIAYAAN NETTO	31.647,42	23.588,79	3.893,45	87,516,24	3,873,19

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

Lebih lengkapnya realisasi dan proyeksi struktur APBD Kabupaten Dharmasraya dari realisasi tahun sebelumnya, dan proyeksi tahun berjalan dan tahun rencana sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 s/d 2021

No.	Uraian Akun	Realisasi			APBD Awal	Perubahan 2021
		2018	2019	2020	2021	Proyeksi
	PENDAPATAN DAERAH	923.540,95	1.019.358,07	990.191,15	950.959,99	950,283,46
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.116,20	78.882,92	82.877,84	84.116,61	88,257,73
	Pendapatan Pajak Daerah	29.231,34	19.178,96	17.751,81	18.714,13	19,356,63
	Pendapatan Retribusi Daerah	2.655,85	3.054,85	1.866,61	3.073,47	3,108,47
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.177,29	3.590,31	4.063,75	4.063,75	3,524,57
	Lain-lain PAD yang Sah	49.051,72	53.058,79	59.195,67	58.265,25	62,268,05
B	PENDAPATAN TRANSFER	808.465,73	906.775,17	872.426,16	835.392,28	828,524,64
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	708.972,42	761.630,74	731.498,44	795.317,90	779,685,693
	Dana Bagi Hasil Pajak	17.647,99	13.711,56	12.973,43	17.078,47	17,129,78
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.729,96	2.116,62	2.174,08	-	-
	Dana Alokasi Umum	501.889,28	524.888,50	478.355,77	488.047,00	472,416,14
	Dana Alokasi Khusus	187.705,19	220.914,06	237.995,16	216.652,03	216,599,35
	Dana Insentif Daerah (DID)				17.000,34	17.000,34
	Dana Desa				56.540,07	56.540,07
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	60.749,03	97.546,29	99.826,68	-	-
	Dana Penyesuaian	60.749,03	97.546,29	99.826,68	-	-
	TRANSFER ANTAR PEMERINTAH DAERAH	38.744,28	47.598,14	41.101,03	40.074,38	48,838,94
	Dana Bagi Hasil Provinsi	38.744,28	47.598,14	41.101,03	40.074,38	48,838,94

No.	Uraian Akun	Realisasi			APBD Awal	Perubahan 2021
		2018	2019	2020	2021	Proyeksi
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.959,02	33.699,98	34.887,15	31.451,10	33,501,100
	Pendapatan Hibah	30.959,02	33.699,98	34.887,15	500,00	2,550,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				30.951,10	30.951,10
	BELANJA DAERAH	931.599,59	1.036.553,41	985.748,84	1,038,476,23	977,503,99
A	BELANJA OPERASI	609.833,42	690.742,58	658.507,03	731,293,22	688,877,645
	Belanja Pegawai	354.371,83	430.141,09	418.043,15	465,348,16	406,538,38
	Belanja Barang dan Jasa	223.663,20	207.300,13	201.504,44	221,767,07	239,898,95
	Bunga					
	Subsidi					
	Hibah	30.837,84	49.451,25	38.795,44	44,177,99	42,440,30
	Bantuan Sosial	194,50	3.132,00	164,00		
	Bantuan Keuangan	766,04	718,11			
B	BELANJA MODAL	215.526,96	226.598,09	195.046,93	191,968,39	177,411,73
	Belanja Tanah	35,30				
	Belanja Peralatan dan Mesin	30.558,56	45.512,22	52.873,40	57,336,38	55,081,78
	Belanja Gedung dan Bangunan	63.559,87	112.232,96	94.052,70	99,633,40	95,379,31
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.802,71	61.210,26	34.663,99	34,521,55	26,367,49
	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.570,52	7.642,65	13.456,83	477,05	583,15
C	BELANJA TAK TERDUGA	744,34	24,18	24.924,27	5.000,00	1.0000,00
	Belanja Tak Terduga	744,34	24,18	24.924,27	5.000,00	1.0000,00
D	BELANJA TRANSFER	105.494,87	119.188,57	107.270,60	110,214,623	110,214,623
	Bagi Hasil Pajak	1.366,44	3.170,65	933,02	2.178,76	2.178,76
	Bantuan Keuangan	104.128,43	116.017,92	106.337,58	108,035,86	108,035,86
	PEMBIAYAAN	31.647,42	23.588,79	3.893,45	87,516,24	3,873,19
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Penggunaan SiLPA	31.647,42	23.588,79	3.893,45	87,516,24	8,334,42
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.647,42	23.588,79	3.893,45	87,516,24	8,334,42
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	Penyertaan Modal Pem. Daerah	-	2.500,00	-	-	4,461,24
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	2.500,00			4,461,24

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan periode akhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode tahun 2016-2021 atau merupakan perencanaan pembangunan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005 – 2025;
2. Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya Semester I Tahun 2021
2. Penyesuaian muatan Perubahan RPJMD 2016-2021 yang menjadi pedoman terhadap penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021;
3. Mempedomani RKP Tahun 2021 serta melakukan langkah-langkah yang sesuai dalam penyusunan RKPD 2021, dan melakukan program pemulihan (recovery) pasca Covid-19. dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengacu pada RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman penyelarasan sasaran;
4. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 pada RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021;
5. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan mendesak di tingkat daerah dan nasional;
6. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
7. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021;
- (4) Korelasinya terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya telah memasuki tahapan tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

“MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan kemungkinan terjadi pada tahun perencanaan yang akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Dharmasraya serta realita tuntutan perkembangan maka Perubahan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 adalah :

1. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas wilayah
2. Peningkatan Derajat Kesehatan dan pemulihan sosial ekonomi masa pandemi Pandemi Covid-19
3. Transpormasi ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan dengan transpormasi dari perekonomian berbasis pertanian ke arah hilirisasi industri untuk mengolah SDA pertanian dan perkebunan (agroindustry)
4. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Pada tahun 2021 pemerintah memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat Covid-19. Terdapat empat sektor yang menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021 yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi pencapaian sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta sasaran ekonomi cukup tajam. Selain itu, pembiayaan pembangunan

terpaksa dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Pemulihan ekonomi usai Covid-19 menjadi bagian dalam rancangan kerja pemerintah (RKP) 2021.

RKP 2021 memuat tujuh prioritas nasional sesuai RPJMN 2020-2021 yakni :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,
3. Peningkatan Sumberdaya Manusia dan berdaya saing
4. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. dan
7. Stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai tema RKP 2021.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, di tetapkan 2 Skenario khusus penanganan Covid-19 yaitu :

1. Skenario pertama kalau Covid-19 ini masih berlanjut, maka fokus kita tetap pada penanganan Covid.

Dalam skenario pertama, pemerintah fokus mencegah penyebaran virus corona, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas kesehatan dan sistemnya, memperkuat ketahanan pangan.

Kemudian mengembangkan industri alat kesehatan, mendukung *social safety net*, bantuan-bantuan sosial kepada warga yang sulit, dan menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup. Ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibandingkan sebelumnya, tidak mati sama sekali.

2. Skenario kedua, jika Covid-19 tetap berlangsung pada 2021, maka pemerintah memprioritaskan program yang mendesak bagi skala nasional maupun tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri yang tidak bisa ditunda.

Namun jika wabah tersebut berakhir tahun ini, fokus pemerintah pada 2021 adalah pemulihan ekonomi dan sektor-sektor yang memajukan kesejahteraan rakyat, dan tetap melanjutkan visi-misi RPJMN Tahun 2020-2024.

Sebelumnya, ada lima program pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan yang menjadi patokan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Namun, program tersebut harus terkendala dengan adanya pandemi Covid-19. Lima program itu adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi, dan transformasi ekonomi.

Adapun tema pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan"

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>Misi 1:</p> <p>Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</p>	<p>1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tenang, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.</p>	<p>1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama</p> <p>3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekot)</p> <p>4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial</p>
	<p>2. Penguatan kelembagaan agama dan adat</p>	<p>5. Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat</p> <p>6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat</p>
<p>Misi 2:</p> <p>Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.</p>	<p>1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur</p> <p>2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur</p>
	<p>2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel</p>	<p>3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan</p>
	<p>3. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif</p>	<p>5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>Misi 3:</p> <p>Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi</p>	<p>1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter</p>	<p>1. Meningkatnya tingkat pendidikan</p> <p>2. Meningkatnya integritas peserta didik</p>
	<p>2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat</p>	<p>3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan</p>
	<p>3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat</p>	<p>4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja</p>
		<p>5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca</p>
	<p>4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna</p>	<p>6. Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
	<p>5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak</p>	<p>7. Meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat secara merata</p>
		<p>8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana</p>
		<p>9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga</p>
		<p>10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan</p>
	<p>11. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender serta pemenuhan hak anak</p>	
	<p>Misi 4:</p> <p>Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing</p>	<p>1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan</p>
<p>2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis</p>		<p>2. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN	
regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	dan meningkatkan kesejahteraan petani	3. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	
		4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	
	3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	5. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman	
	4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	6. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	
	5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	7. Menurunnya jumlah penduduk miskin	
		8. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	
		9. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	
		10. Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	
	Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
			2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas			
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air			
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan			
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)			
2. Meningkatkan Pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan		7. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	
		8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
		9. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	
3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana		10. Berkurangnya resiko bencana	
		11. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan	

MISI	TUJUAN	SASARAN
		pemulihan wilayah/daerah pasca bencana
	4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	12. Terpeliharanya debit sungai 13. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Sumber : RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**” terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkepribadian, dan berkualitas tinggi”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah”** terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”** terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut dan penetapan Tema RKP Tahun 2021 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Didukung Oleh Pertumbuhan Berkualitas Melalui Pengembangan Hilirisasi Pertanian, Pariwisata, Investasi, Dan Infrastruktur Di Berbagai Wilayah”.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya **“Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”**. Makna dari visi ini adalah :

Mandiri :

- Ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal dengan mendorong keragaman produksi daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi keluarga, serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.
- Semakin besarnya peran masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan pemasaran.
- Berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitar.

Berbudaya :

- Semakin cerdas terdidik dan terampilnya anak negeri.
- Kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Berdasarkan ketujuh misi tersebut, keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan dengan visi disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan dalam
RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.	1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Meningkatnya akses kesehatan
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		3. Meningkatkan kesiagaan pelayanan kesehatan
		4. Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat
	2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan	1. Meratanya akses pendidikan
		2. Terwujudnya pendidikan yang bermutu melalui standarisasi sekolah dan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel
		3. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
		4. Meningkatnya program pendidikan keagamaan
		5. Meningkatnya tingkat pendidikan

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih	1. Peningkatan fungsi balai latihan kerja
		2. Penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari
	4. Peningkatan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		2. Tertanganinya permasalahan sosial masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	1. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari	1. Revitalisasi kawasan pasar Sungai Rumbai, Koto Baru, Pulau Punjung.
		2. Revitalisasi los kios pasar nagari
	2. Membangun ruang publik untuk masyarakat	1. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk
		2. Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten
	3. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat	1. Lancarnya akses antar permukiman dan terbebasnya penduduk dari keterisoliran
		2. Akses yang lancar membawa hasil bumi ke pasar
	4. Peningkatan penyediaan Air Minum	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan
	5. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat	1. Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan
		2. Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan
		3. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin
Misi 3 : Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	1. Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan
		2. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak
		3. Meningkatkan produksi perikanan
		4. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian
	2. Peningkatan ekonomi petani	1. Meningkatnya diversifikasi budidaya pertanian

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Meningkatnya intensifikasi budidaya pertanian
		3. Meningkatnya nilai tambah hasil tambang rakyat
	3. Peningkatan produksi industri lokal	Meningkatnya nilai produksi industri
	4. Peningkatan kegiatan perdagangan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan rakyat disektor perdagangan eceran dan perdagangan komoditi
Misi 4 : Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	1. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial
	2. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	1. Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten
		2. Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
	3. Penghijauan lahan kritis	Berkurangnya lahan kritis
	4. Pelestarian keanekaragaman hayati	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan
	5. Pengendalian pencemaran lingkungan	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari
	6. Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.	1. Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi
	2. Memantapkan sistem pembangunan daerah	1. Peningkatan Profesionalitas aparatur
		2. Peningkatan kinerja pelaksanaan tahapan pembangunan daerah
	3. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah	1. Terbentuknya unit pengumpulan dan pengolahan data pembangunan
2. Terbangunnya data pembangunan terintegrasi dalam sistem informasi		
4. Membangun basis data pembangunan nagari dan kecamatan	Sinkronnya basis data nagari dan kecamatan	

VISI : "MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA"			
MISI	TUJUAN	SASARAN	
Misi 6 : Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.	1. Membangun BUM Nagari	Adanya BUMNagari	
	2. Melakukan pembangunan berbasis nagari	Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan	
Misi 7 : Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun	1. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kehidupan beragama	
	2. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya	2. Meningkatkan peran adat	
		1. Adanya pelestarian warisan budaya Dharmasraya	
		2. Terkelolanya khazanah dan warisan budaya Dharmasraya	

Sumber : Lampiran Perda No.4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan perubahan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi semester kinerja pembangunan daerah tahun 2021
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
3. Sasaran pokok arah kebijakan periode kelima pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
4. Penyesuaian muatan Perubahan RPJMD 2016-2021 yang menjadi pedoman terhadap penyusunan RKPDP Tahun 2021

4.2.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024. Untuk itu tema RKP 2021 adalah **"MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL"** yang adaptif dan responsif sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19, dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara.

Sesuai dengan kondisi yang ada bahwa Tema RKP 2021 mengalami penyesuaian. Tema RKP 2021 sebelum Pandemi Covid 19: "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 telah disepakati 7 Rancangan Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa,
- 2) Memajukan kebudayaan,
- 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
- 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
- 5) Meningkatkan budaya literasi

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam

RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

5.2.1. Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya, terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun 2021 tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang didukung dengan memperkuat pengembangan hilirisasi pertanian, kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi serta pariwisata.

Tahun 2021 merupakan waktu evaluasi pertengahan jalan RPJMD tahun 2016-2021 guna mengetahui perkembangan pelaksanaan dan target capaian RPJMD serta permasalahan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. (1) Pembangunan Manusia; (2) Penguatan Konektivitas; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021
1.	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3.	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5.	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
6.	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7.	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8.	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9.	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10.	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Penyelarasan antara prioritas Nasional Tahun 2021 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Tahun 2021	Keterangan
1.	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Prioritas 5
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Prioritas 7
2.	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Prioritas 8
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Prioritas 3
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Prioritas 1
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Prioritas 9
		Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Prioritas 6
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Prioritas 10
7	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Prioritas 2

Sumber : Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat

Pembangunan mental dan pengamalan agama dan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) diarahkan untuk pencapaian:

1) Masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya serta punya etos kerja tinggi dan produktif, 2) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 3) Pengamalan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Penurunan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Optimalisasi peran lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Penurunan perbuatan maksiat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama
3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekot)
4. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah social
5. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
6. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Prioritas ini diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan dicapai : 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas KKN, 4) Tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Penyediaan data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 6) Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, 7) Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Sasaran yang hendak dicapai Prioritas ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan dicapai: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Peningkatan angka partisipasi pendidikan, 4) Pelaksanaan pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Sumatera Barat, 6) Pendidikan spesifik sesuai dengan bakat sumberdaya manusia, 7) Lembaga pendidikan penghasil sumberdaya manusia yang profesional, 8) Wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Pengembangan penelitian dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olah raga, 12) Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya integritas peserta didik
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja
5. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
6. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
8. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
11. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan angka kesakitan dan kematian, 2) Peningkatan angka harapan hidup, 3) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Penurunan persentase masyarakat gizi kurang, 6) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat,

7) Peningkatan layanan rumah sakit dengan standar pelayanan yang terakreditasi paripurna.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pem-bangunan keluarga dan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga
4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak

5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Prioritas ini diarahkan pada pengembangan dan peningkatan produksi pangan untuk menunjang kebijakan nasional dibidang kedaulatan pangan serta mengembangkan sistem agribisnis dalam pembangunan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan dapat dicapai: 1) Peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, 2) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, 3) Pengembangan agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 4) Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi penghasil pangan nasional, 5) Penerapan teknologi pertanian tepat guna, 6) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, 7) Pola pembangunan pertanian berbasis kawasan dan berbasis komoditi unggulan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan
2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis
3. Meningkat-nya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.

Prioritas ini diarahkan untuk mengembangkan pariwisata, industri skala kecil dan menengah dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan investasi. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Pengembangan objek dankawasan wisata yang potensial, 2) Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepariwisataan, 3) Sumatera Barat sebagai destinasi utama

pariwisata berbasis agama dan budaya, 4) Pengembangan sentra industri dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 5) Peningkatan daya saing produk industri dan jasa, 6) Peningkatan jenis, volume dan nilai ekspor serta ekspor produk industri, 7) Peningkatan kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 8) Peningkatan peran Koperasi dan UMKMdalam perekonomian daerah, 8) Peningkatan Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja.

Sasaran yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan untuk peningkatan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan dicapai: 1) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, 2) Peningkatan produksi perikanan laut baik tangkap maupun budidaya, 3) Pengembangan wisata bahari, 4) Optimalisasi pengelolaan ruang laut dan pulau-pulau kecil, 5) Peningkatan kerjasama regional lintas pesisir wilayah laut.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman

8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah. Dengan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin, 3) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 4) Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial, 5) Peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial

9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur

Prioritas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan mendorong investasi dibidang energi baru dan terbarukan serta pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik, 2) Peningkatan penyediaan listrik di daerah terpencil, terisolir dan perbatasan, 3) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, 4) Peningkatan pelayanan transportasi dan keselamatan lalu lintas, 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, 6) Peningkatan prasarana umum pada kawasan pemukiman

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi
2. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
3. Meningkatnya keselamatan lalu lintas,
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung
6. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)

10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menekan kerugian akibat bencana. Dengan pelaksanaan prioritas ini diharapkan akan dicapai: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang, 3) Peningkatan kualitas lahan dan fungsi ekosistem, 4) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, 5) Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah atau daerah pasca bencana, 6) Peningkatan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Sasaran yang hendak dicapai:

1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3. Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
4. Berkurangnya resiko bencana
5. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana

6. Terpeliharanya debit sungai
7. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

Kebijakan Pemerintah pusat yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow program*, bertujuan agar pencapaian pembangunan dan penetapan prioritas pemerintah dapat berjalan maksimal (berhasil) dan tepat sasaran. Kebijakan ini diimplementasikan dengan cara mengarahkan anggaran untuk fokus pada prioritas pembangunan, relokasi program kegiatan yang telah memenuhi target dan efisiensi anggaran program non prioritas.

Selain hal tersebut diatas hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD 2021 yakni:

1. Melakukan Reformulasi target kinerja pemerintah daerah akibat dampak pandemi Covid-19.
2. Menetapkan Sektor Kesehatan sebagai salah satu fokus pembangunan paska pandemi Covid-19.
3. Meningkatkan ketahanan pangan.
4. Menetapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
5. Menetapkan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan industri padat karya.
6. Alokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sebagai rangkaian paska pandemi Covid-19 dalam upaya perluasan jaring pengaman sosial.
7. Efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Dharmasraya dalam menyusun RKPD Tahun 2021, menetapkan prioritas pembangunan yang juga mempedomani prioritas pembangunan Nasional, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penentuan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan pokok, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas).

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya serta isu strategis Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan (astha utama) yang menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah.

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah
2. Membangun berbasis nagari

3. Membangkitkan identitas daerah
4. Memeratakan infrastruktur
5. Memajukan pendidikan yang berkarakter
6. Meningkatkan derajat kesehatan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi
8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan *sustainable development*)

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dapat dijadikan delapan prioritas pembangunan (hastha utama) diwujudkan selama 5 tahun secara berkesinambungan. Oleh sebab itu pembangunan setiap tahun menekankan pada pencapaian kondisi-kondisi tertentu dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran.

Mengingat kondisi yang terjadi saat ini, maka skenario pembangunan dalam Perubahan RKPD 2021 yaitu melanjutkan dan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19 dengan Fokus:

1. Kesehatan;
2. Dampak ekonomi; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.
4. Program-program mendesak lainnya di daerah.
5. Program-program strategis nasional

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021 maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 diarahkan pada proses pemulihan dampak Covid-19 dengan tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan masih terjadinya kasus Covid-19.

Berdasarkan kondisi tersebut maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yaitu

“PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN PENGUATAN SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT SERTA PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR”

Sementara prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1)Kesesuaian dengan dokumen

perencanaan; (2)Urgensitas penanganan isu;dan (3)kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 pada tahun ke-5. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2011-2021	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021
1.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah	Pemerataan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah
2.	Membangun berbasis nagari	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3.	Membangkitkan identitas daerah	Peningkatan Kualitas Pendidikan
4.	Memeratakan infrastruktur	Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi
5.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan
6.	Meningkatkan derajat kesehatan	Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah
7.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Nagari
8.	Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan sustainable development)	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana

Penyelarasan antara prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2021, Prioritas Provinsi Tahun 2021 dan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKP Provinsi Sumatera Tahun 2021	Prioritas RKP Kab. Dharmasraya Tahun 2021
1.	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis (Prioritas 5)	Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Nagari (Prioritas 6)
		Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan (Prioritas 7)	
2.	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 8)	
3	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (Prioritas 3)	Peningkatan Kualitas Pendidikan (Prioritas 3)
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prioritas 4)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Prioritas 2)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat (Prioritas 1)	Pemajuan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah (Prioritas 6)
5	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur (Prioritas 9)	Pemerataan Infrastruktur Dalam Meningkatkan Konektivitas Antar Daerah (Prioritas 1)
		Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi (Prioritas 6)	Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi (Prioritas 4)
6	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (Prioritas 10)	Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana (Prioritas 8)
7	Stabilitas Polhukhankam dan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan (Prioritas 2)	Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Tata Kelola

No.	Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKP Provinsi Sumatera Tahun 2021	Prioritas RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2021
	Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintahan (Prioritas 5)

4.2.3. Kebijakan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2021 memberikan dampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Secara makro, kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi cukup besar pada ekonomi Kabupaten Dharmasraya seperti industri pengolahan, dan perdagangan. Pandemi ini juga berdampak pada terhambatnya investasi di Kabupaten Dharmasraya yang juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya.

Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat, bahkan diprediksikan akan muncul penduduk miskin baru, dan pengangguran baru. Kondisi ini juga dapat memberikan dampak pada tingkat kondusivitas wilayah, dimana mulai diindikasikan adanya peningkatan kasus-kasus kriminalitas di masyarakat.

Hal tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menyusun kembali kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan dinamika pandemi ini. Kebijakan pembangunan daerah sampai ke penganggaran di tahun 2020 telah dilakukan perubahan yang difokuskan pada penanganan darurat pandemi ini melalui mekanisme refocussing kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.

Adanya pandemi Covid-19 sejak dari triwulan I 2020 berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi, baik secara level nasional maupun untuk Sumatera Barat bahkan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah Kabupaten/Kota.

Pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan IV secara nasional sebesar 4,97% (yoy), dan di Sumatera Barat sebesar 5,13% di tahun 2019, namun memasuki triwulan I tahun 2020 angka ini menunjukkan

penurunan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 2,97% secara nasional dan 3,92% untuk Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 fokus pada upaya pemulihan akibat pandemi Covid-19 dengan tetap melakukan antisipasi kemungkinan belum berakhirnya kasus Covid-19, terutama pada sektor ekonomi, sosial, politik, dan hankamtibmas.

Kebijakan pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19 difokuskan pada dua hal yaitu :

- 1) secara makro adalah pemulihan kondisi perekonomian daerah dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif; dan
- 2) secara mikro adalah pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19 ini seperti pelaku UMKM, penduduk miskin dan rentan miskin, penganggur, dan lainnya.

Kebijakan ini tetap didukung dengan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, tetap menjaga kondusivitas wilayah, serta tetap membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pondasi pengarusutamaan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Tema RKP 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" dengan pertimbangan mitigasi Covid-19 mengingat saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, terberat sejak krisis finansial Asia 1998/1999. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia namun hampir di semua negara di seluruh dunia dan secara global terus fokus mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi Pandemi Covid-19.

Untuk itu, langkah-langkah strategis secara nasional dituangkan di dalam RKP 2021 berkaitan dengan upaya menjawab tantangan yang dihadapi khususnya dampak yang besar terhadap pembangunan nasional yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19. Langkah-langkah strategis tersebut disusun untuk mengembalikan arah pembangunan sesuai dengan target sasaran RPJMN 2020-2024 dengan melakukan koreksi terhadap sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di tahun 2020 dan tentunya berpengaruh di tahun 2021.

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan kondisi perekonomian daerah antara lain mendorong peningkatan pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang menjadi basis ekonomi daerah Kabupaten Dharmasraya seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan perdagangan, mendorong kembali investasi untuk masuk ke Kabupaten Dharmasraya, mendorong ekspor dan substitusi impor, serta melakukan

pemberdayaan ekonomi terutama bagi pelaku UKM/IKM, dengan tetap melakukan pengendalian inflasi. Ekonomi juga akan tumbuh dengan didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung dalam upaya meningkatkan distribusi barang dan jasa ekonomi.

Intervensi kebijakan pada jangka pendek antara lain meliputi penyelamatan UMKM, penyediaan lapangan kerja di desa dan menjaga ketahanan UMKM dan pangan. Sedangkan jangka menengah – panjang pada pemulihan dan pemberdayaan ekonomi dan pengembangan kapasitas ekonomi kreatif. Pada intervensi kebijakan jangka pendek, di dalamnya meliputi program/kegiatan bansos, relaksasi kredit, pemberian kredit jangka pendek, penyediaan lapangan kerja, padat karya, peningkatan SDM, pendampingan industri, bantuan pangan, bantuan stimulan (pakan ternak, benih/bibit, alsintan, alat tangkap, BBM nelayan, asuransi petani dan nelayan). Sedangkan intervensi kebijakan jangka panjang antara lain dengan program/kegiatan pemberian akses modal, kemitraan usaha, pemulihan citra pariwisata, capacity building, pelatihan dan stimulan alat paska panen, pengolahan hasil, peningkatan produksi, mendorong ekspor dan substitusi impor, pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kampung/desa kreatif, pembiayaan, pemasaran dan perlindungan produk ekraf.

Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan membangkitkan perekonomian pedesaan dan UMKM melalui pemetaan berbagai potensi desa berdasarkan pada klaster UMKM (bidang usaha, tenaga kerja, dan bahan baku), pemulihan pasar lokal, mendorong masyarakat untuk membeli produk UMKM, kemudahan akses permodalan (tanpa bunga), bantuan sarana produksi, subsidi energi, memperkuat kemitraan dengan perusahaan besar, serta pendampingan melibatkan akademisi dan penyuluh. Dalam penciptaan lapangan kerja untuk mengantisipasi tenaga kerja migran (termasuk yang di PHK) dan telah memiliki keterampilan tertentu maka perlu dilakukan pemanfaatan informasi kartu pra kerja, updating tenaga kerja, pelatihan melalui BLK dan kerjasama kampus, pendampingan pencari kerja, padat karya terutama di desa, serta pemulihan dan perkuatan UMKM.

Strategi pada pemulihan ekonomi memerlukan kombinasi kebijakan dengan pemerintah pusat untuk membangkitkan industri padat karya, dengan pemberian insentif super tax deduction, mempermudah izin investasi, insentif air tanah, dan bunga murah khususnya pada industri seperti industri makanan dan minuman, hotel dan restoran, industri kimia dan obat-obatan, industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan furniture. Di sisi lain produktivitas pada sektor primer (pertanian dalam arti luas) harus tetap dijaga supaya berjalan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga distribusi dan ketersediaan kebutuhan pangan melalui peningkatan ketahanan pangan dalam rangka

penyediaan bahan pangan serta menjaga psikologi masyarakat akan ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan harga/inflasi serta mengurangi mobilitas warga keluar dari wilayahnya.

Selanjutnya untuk mendukung upaya pemulihan tersebut di atas melalui perkuatan Koperasi dan UMKM berbasis kewilayahan serta potensi lokal yang tepat kebijakan dan sasaran, perlu kategori pemberian bantuan menjadi 4 yaitu :

- 1) UMKM yang masih memproduksi dan masih mempunyai pasar antara lain dengan menjaga daya saing, relaksasi pajak, info pasar, menjembatani hubungan tenaga kerja dan UMKM, memperluas kemitraan;
- 2) UMKM yang masih memproduksi, namun pasar terkendala antara lain dengan pasar alternatif, media online;
- 3) UMKM tidak memproduksi, namun mempunyai potensi pasar perlu akses investasi;
- 4) UMKM tidak memproduksi, dan tidak ada pasar difasilitasi dengan bansos.

Sementara strategi yang dapat dilakukan dalam rangka memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat antara lain dengan 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, rumah layak, dan akses KB; 2) meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dengan keperantaraan pelaku usaha kecil, dan keperantaraan akses pasar, modal, bahan baku, digital platform, dan pelatihan/inkubasi, serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat dengan padat karya dan job market. Strategi tersebut diperkuat dengan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan health security dan sistem kesehatan daerah, dan sektor pendidikan sebagai bentuk adaptasi model pendidikan pasca pandemi Covid-19 dengan pengembangan sistem pembelajaran dan teknologi.

Kebijakan tersebut didukung dengan kebijakan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap berbagai perubahan termasuk perubahan akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini lebih mengarah ke perubahan pola kerja birokrasi yang menerapkan pola work from home dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, tetap memperhatikan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.

Kebijakan penting lainnya yang mendukung kebijakan pemulihan Covid-19 adalah bagaimana menciptakan wilayah Kabupaten Dharmasraya agar tetap kondusif. Dalam rangka pemantauan dan menjaga kondusivitas wilayah pasca pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat

pemerintahan serta lintas sektor, antara lain deteksi dan cegah dini kejadian konflik sosial, pengamanan distribusi Jaringan Pengaman Sosial/JPS (Social Safety Net), pengawasan terhadap pelaksanaan asimilasi dan hak integrasi bagi anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, serta sosialisasi yang lebih masif kepada seluruh elemen masyarakat terkait bahaya dan dampak Covid-19 terhadap kondusivitas wilayah.

Kebijakan pemulihan dampak Covid-19 dilakukan dengan berbagai program/kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah, yang didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan lainnya

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik rencana kerja ini memuat program pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan sudah dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021

Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2021 menurut Bidang Urusan lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan program dan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rekap Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2021
Kabupaten Dharmasraya (Terlampir)

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
					10.861.733.010,00				10.861.733.010
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.553.660.210,00				3.553.660.210
1 04 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-				0
1 04 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra PD		0 dokumen	-			0 dokumen	0
1 04 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.825.254.000,00				2.825.254.000
1 04 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn (16 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (16 orang)		0 bulan 0 bulan	2.825.254.000,00			0 bulan 0 bulan	2.825.254.000
1 04 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-				0
1 04 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian hari khusus		0 stel	-			0 stel	0
1 04 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal		0 orang	-			0 orang	0
1 04 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				202.431.210,00				202.431.210
1 04 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 tahun	9.855.000,00			0 tahun	9.855.000
1 04 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alas tulis kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		0 tahun 0 paket	50.993.810,00			0 tahun 0 paket	50.993.810
1 04 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga		0 paket	-			0 paket	0
1 04 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan minuman		0 tahun	19.672.400,00			0 tahun	19.672.400
1 04 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan		0 tahun	23.840.000,00			0 tahun	23.840.000
1 04 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		0 tahun	98.070.000,00			0 tahun	98.070.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 04 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			0	
1 04 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya prasarana kantor		0 paket	-		0 paket	0	
1 04 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				465.350.000,00			465.350.000	
1 04 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bahan jasa surat menyurat		0 bulan	-		0 bulan	0	
1 04 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0 unit	-		0 unit	0	
1 04 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		0 tahun 0 paket	8.000.000,00		0 tahun 0 paket	8.000.000	
1 04 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa kebersihan kantor		0 bulan 0 tahun	457.350.000,00		0 bulan 0 tahun	457.350.000	
1 04 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.625.000,00			60.625.000	
1 04 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (3 mobil, 7 sepeda motor)		0 unit	60.625.000,00		0 unit	60.625.000	
1 04 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara Tersedianya kendaraan untuk kelancaran kegiatan (1 Mobil 2 motor)		0 tahun 0 unit	-		0 tahun 0 unit	0	
1 04 01 2,09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor Dinas Perkintan		0 paket	-		0 paket	0	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				-			0	
1 04 02 2,05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				-			0	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun umum dan/Rmuaah Khusus			1 unit			0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				4.109.256.700,00				4109256700
1 04 03 2,01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				110.254.000,00				110.254.000
1 04 03 2,01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan		110.254.000,00	Dana yTar,ansfer Umum- ,Dana Alokasi Umum			110.254.000
1 04 03 2,03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				3.999.002.700,00				3.999.002.700
1 04 03 2,03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Penurunan luasan kawasan pemukiman kumuh	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	10 persen	3.999.002.700,00	Dana yTar,ansfer Umum- ,Dana Alokasi Umum		10 persen	3.999.002.700
1 04 03 2,03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	indikator tolong dirubah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 unit	-	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum		1 unit	0
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				78.874.500,00				78.874.500
1 04 04 2,01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				78.874.500,00				78.874.500
1 04 04 2,01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan	Meningkatkan penyediaan rumah layak yang terjangkau bagi MBR		0 unit 0 unit	78.874.500,00			0 unit 0 unit	78.874.500

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				3.119.941.600,00				3.119.941.600
1 04 05 2,01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan				3.119.941.600,00				3.119.941.600
1 04 05 2,01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Penyusunan Peraturan Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lisiba/Kasiba)		0 Paket	2.191.751.100,00			0 Paket	2.191.751.100
1 04 05 2,01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Fasilitasi Dan Stimulasi Rahabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam dan Sosial Pembangunan Drainase Perumahan pembangunan/ rehab mushallah atau masjid Pembuatan Tanah Kuburan Atau Makam Penanganan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Peningkatan Kualitas Jalan Perumahan/Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman Terlaksananya operasional rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	0 Paket 0 Paket 43 unit 0 Paket 0 Dokumen 0 Paket 0 Paket 0 unit	928.190.500,00	YPT NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket 0 Paket 43 unit 0 Paket 0 Dokumen 0 Paket 0 Paket 0 unit	928.190.500	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				551.933.000,00				551.933.000
2 10 09 2,01	Penerbitan Izin Membuka Tanah				551.933.000,00				551.933.000
2 10 09 2,01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Sertipikat Tanah Pemda yang terbit	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	40 persil	551.933.000,00	Dana yTar,ansfer Umum- Dana Alokasi Umum	40 persil	551.933.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				50.285.000,00				50.285.000
2 10 10 2,01	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				50.285.000,00				50.285.000
2 10 10 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertipikat Tanah Pemda yang terbit Penyusunan Sistem Informasi Tanah yang Handal		0 dokumen 0 Paket	50.285.000,00			0 dokumen 0 Paket	50.285.000
JUMLAH					11.463.951.010,00				11.463.951.010,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA BERTINDUNG MASYARAKAT								
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.261.570.050,00				6.574.622.050
1 05 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-				0
1 05 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra PD		0 dokumen	-			0 dokumen	0
1 05 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.459.331.000,00				2.062.300.000
1 05 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn (26 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn 26 orang		0 bulan 0 bulan	2.459.331.000,00			0 bulan 0 bulan	2.062.300.000
1 05 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-				0
1 05 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar		0 stel	-			0 stel	0
1 05 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biaya Pelatihan Teknis, Diksar dan Diklat PPNS Pelatihan Personil Pemadam Kebakaran		0 Personil 0 personil	-			0 Personil 0 personil	0
1 05 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				122.568.650,00				126.516.650
1 05 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik		0 Paket	2.970.000,00			1 Paket	1.910.000
1 05 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor Tersedinya PC Komputer dan Printer		0 Tahun 0 unit	15.017.050,00			0 Tahun 0 unit	15.017.050
1 05 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	belanja Alat kebersihan dan bahan pembersih Belanja Peralatan Rumah Tangga		0 bulan 0 Tahun	2.595.600,00			0 bulan 0 Tahun	2.595.600
1 05 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Makanan dan Minuman		0 Tahun	11.992.000,00			1 Tahun	9.000.000
1 05 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy dan cetak Blangko, Spanduk dll		0 Tahun	9.996.000,00			0 Tahun	7.996.000
1 05 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran BBM, Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas		0 Tahun	79.998.000,00			1 Tahun	89.998.000
1 05 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gaji PTT, Petugas Satpol PP dan			4.570.080.000,00			0	4.176.215.000
1 05 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan surat menyurat		0 bulan	2.100.000,00			0 bulan	2.100.000
1 05 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Listrik dan Speedy		0 bulan	33.600.000,00			0 bulan	33.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 05 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honorarium PNS dan THL dinas Satpol PP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 tahun	4.534.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Lokasi Umum	1 tahun	4.140.515.000	
1 05 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.590.400,00			209.590.400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan jabatan							
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Mobil Pemadam kebakaran dan mobil dinas ,		0 unit	98.100.400,00			198.100.400	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		0 kendaraan					
		Perawatan dan BBM kendaraan dinas		0 unit					
1 05 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perawatan dan Perbaikan Komputer, Laptop, Printer dan AC		0 unit	11.490.000			0 unit 11.490.000	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				110.344.200			208.244.200	
1 05 02 2,01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				68.360.000			68.360.000	
1 05 02 2,01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Nasional dan Kegiatan Daerah		0 kali 0 Tahun	68.360.000			0 kali 0 Tahun 68.360.000	
1 05 02 2,01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelatihan Linmas Nagari		0 personil	0			0 personil 0	
1 05 02 2,02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				41.984.200			139.884.200	
1 05 02 2,02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Penegakan Perda		0 kali	41.984.200			1 Tahun 139.884.200	
1 05 02 2,02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Operasi Penegakan Perda dan Perkada		0 kali	0			0 kali 0	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				20.818.750			30.818.750	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 05 04 2,01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.818.750				30.818.750

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 05 04 2,01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman kejadian Kebakaran		0 Tahun	20.818.750			0 Tahun	30.818.750
1 05 04 2,01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Baju Anti Api dan APAR		0 buah	0			0 buah	0
JUMLAH						7.392.733.000,00			6.813.685.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan			Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.739.385.639			2.731.110.639
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.809.728.588			1.809.728.588
1 05 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0			0
1 05 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra PD		0 dokumen	0		0 dokumen	0
1 05 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				833.248.000			833.248.000
1 05 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn 8 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 8 orang		0 bulan 0 bulan	833.248.000		0 bulan 0 bulan	833.248.000
1 05 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0			0
1 05 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia (stel)		0 unit	0		0 unit	0
1 05 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)		0 orang	0		0 orang	0
1 05 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				178.037.588			178.037.588
1 05 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia secara optimal (pkt)		0 paket	2.500.000		0 paket	2.500.000
1 05 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK untuk kegiatan kantor (bulan) Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia (thn)		0 bu;an 0 Unit	43.516.488		0 bu;an 0 Unit	43.516.488
1 05 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia (pkt)		0 jenis	0		0 jenis	0
1 05 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kantor yang tersedia (thn)		0 tahun	67.010.000		0 tahun	67.010.000
1 05 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (bln)		0 bulan	3.821.100		0 bulan	3.821.100
1 05 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keuangan Daerah Yang terlaksana		0 bulan	61.190.000		0 bulan	61.190.000
1 05 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.735.000			8.735.000
1 05 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Kantor yang diadakan (thn)		0 Unit	8.735.000		0 Unit	8.735.000
1 05 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700.908.000			700.908.000
1 05 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 6000 dan Materai 3000 terbeli (lembar)		0 lembar	2.085.000		0 lembar	2.085.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 05 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Jasa Rekening Telepon, Air, dan Listrik (bln)		0 bulan	18.000.000			0 bulan	18.000.000
1 05 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Porsentase peralatan kerja yang diperbaiki (3 unit Komputer PC, Laptop 5 unit, printer 7 unit) (%)		0 unit	11.083.000			0 unit	11.083.000
1 05 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium PA, PPK,PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Petugas K3, Penjaga Kantor, Petugas SAR, Sopir (orang) Porsentase pembelian Alat kebersihan (%)		0 orang kegiatan 0 bulan	669.740.000			0 orang kegiatan 0 bulan	669.740.000
1 05 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				88.800.000				88.800.000
1 05 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Bermotor yang dibayar pajak (unit)		0 unit	0			0 unit	0
1 05 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (mobil 4 unit, sepeda motor 9 unit, genset 3 unit, chainsaw 3 unit, motor boar 4 unit, perahu karet 2 unit)		0 unit	38.800.000			0 unit	38.800.000
1 05 01 2,09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Sewa Kantor yang tersedia (thn)		0 tahun	50.000.000			0 tahun	50.000.000
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA				929.657.051				921.382.051
1 05 03 2,01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				25.070.000				25.070.000
1 05 03 2,01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana kontijensi sampai dinyatakan sah/legal Persentase (%) penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen	25.070.000			0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen	25.070.000
1 05 03 2,01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (%)		0 lokasi	0			0 lokasi	0
1 05 03 2,02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				0				772.619.051
1 05 03 2,02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana (orano)		0 orang	0			0 orang	0
1 05 03 2,02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam yang disediakan : motor boat 1 unit, dan perahu karet 2 unit Persentase (%) Warga Negara yang mendapat layanan pUSDalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		0 paket 0 orang	0			0 paket 0 orang	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 05 03 2,02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	penanganan pasca bencana		0 Paket	0			1 Paket	772.619.051
1 05 03 2,02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Satgas PB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan (orang)		0 orang	0			0 orang	0
1 05 03 2,03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				44.285.000				44.285.000
1 05 03 2,03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB dan status darurat bencana(%)		0 persentas	44.285.000			e 0 persentas	44.285.000
1 05 03 2,04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				860.302.051				79.408.000
1 05 03 2,04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Perda tentang penanggulangan bencana daerah	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	860.302.051	Dana yTar,ansfer Umum- ,Dana Alokasi Umum		1 dokumen	79.408.000
1 05 03 2,04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti simulasi/ pelatihan tanggap bencana di Kab. Dharmasraya (org) Terbentuknya Tim JITUPASNA dan kajian kebutuhan pascabencana (dok)		0 orang 0 tim	0			0 orang 0 tim	0
1 05 03 2,04 03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jambore PRB Tk. Provinsi Sumatera Barat yang diikuti (kegiatan)		0 kegiatan	0			0 kegiatan	0
JUMLAH						2.739.385.639			2.731.110.639,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
					5.107.971.400				5.107.971.400
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1 06 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1 06 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn (28 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (28 orang)		0 bulan 0 bulan	3.141.924.000			0 bulan 0 bulan	3.141.924.000
1 06 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1 06 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya komponen instalasi listrik		0 Paket	10.100.000			0 Paket	10.100.000
1 06 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat perlengkapan kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor		0 bulan 0 paket	50.002.000			0 bulan 0 paket	50.002.000
1 06 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		0 Paket	7.998.500			0 Paket	7.998.500
1 06 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu		0 Paket	24.000.000			0 Paket	24.000.000
1 06 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		0 kegiatan	59.786.200			0 kegiatan	59.786.200
1 06 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		0 tahun	0			0 tahun	0
1 06 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		0 tahun	80.004.200			0 tahun	80.004.200
1 06 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1 06 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur kantor (meja biro 2 unit, meja staf 15 unit,kursi staf 15 unit, kursi tamu 1 set, meja/kursi rapat 1 set, lemari arsip 2 unit, meja telpon/ fax 1 unit, kursi rapat napolly 50 unit,)		0 unit	9.000.000			0 unit	9.000.000
1 06 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1 06 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan peranko		0 lembar	9.000.000			0 lembar	9.000.000
1 06 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telpon, internet, listrik dinas serta listrik gudang KB		0 Unit	50.400.000			0 Unit	50.400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pengelola keuangan dinas		0 tahun	1.039.530.000			0 tahun	1.039.530.000
1 06 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				198.070.000				198.070.000
1 06 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan jabatan		0 unit	19.000.000			0 unit	19.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor (roda 4 sebanyak 9 unit, roda 2 sebanyak 32 unit)		0 Unit 0 unit	156.300.000			0 Unit 0 unit	156.300.000
1 06 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai (laptop 16 unit, PC 14 unit, AC 3 unit, Infocus 15 unit)		0 unit	22.770.000			0 unit	22.770.000
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				115.993.150				115.993.150
1 06 02 2,03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				115.993.150				115.993.150
1 06 02 2,03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		0 orang	65.323.200			0 orang	65.323.200
1 06 02 2,03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian PSKS berprestasi		0 orang	18.338.900			0 orang	18.338.900
1 06 02 2,03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah peserta koordinasi LKKS dan LK3 Jumlah peserta penguatan peran LKS Posdaya Persentase terselenggaranya operasional LK3		0 orang 0 orang 0 persen	32.331.050			0 orang 0 orang 0 persen	32.331.050
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				55.781.500				55.781.500
1 06 04 2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				55.781.500				55.781.500
1 06 04 2,01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang cacat yang memperoleh pelayanan dan pembinaan		0 orang	15.200.000			0 orang	15.200.000
1 06 04 2,01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah lansia terlantar yang diberi bantuan dan perlindungan Jumlah tuna sosial dan PMKS lainnya di luar panti yang dilayani dan dibina		0 orang 0 orang	5.000.000			0 orang 0 orang	5.000.000
1 06 04 2,01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Korban pelecehan seksual dan Anak berhadapan dengan hukum yang disabilitas		0 orang	28.159.000			0 orang	28.159.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 04 2,01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Anak terlantar yang dilatih		0 orang	0			0 orang	0
1 06 04 2,01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya perangkat pengolah data yang mendukung Pusat Layanan Data Sosial (meubeler 1 set, AC 3 unit, Router dan aksespoint 1 unit, komputer dan printer 2 unit, laptop 2 unit)		0 Unit	7.422.500			0 Unit	7.422.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				53.414.350				53.414.350
1 06 05 2,02	Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				53.414.350				
1 06 05 2,02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir Miskin yang terdata dalam data BDT (Basis Data Terpadu) yang mendapatkan Program Perlindungan Sosial Jumlah Nagari yang diberikan Bansos/BPNT		0 jiwa 0 nagari	53.414.350			0 jiwa 0 nagari	53.414.350
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				202.967.500				202.967.500
1 06 06 2,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				202.967.500				202.967.500
1 06 06 2,01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dibantu		0 orang	202.967.500			0 orang	202.967.500
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				799.678.500				799.678.500
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				711.818.500				711.818.500
2 08 02 2,01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				54.407.000				54.407.000
2 08 02 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase POKJA PUG		0 %	54.407.000			0 %	54.407.000
2 08 02 2,03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				657.411.500				657.411.500
2 08 02 2,03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada layanan pemberdayaan perempuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 kegiatan	657.411.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	657.411.500
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				47.784.000				47.784.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				47.784.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota			0 oarang	47.784.000			#REF!	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				40.076.000				40.076.000
2 08 06 2,02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				40.076.000				40.076.000
2 08 06 2,02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA)		0 lokasi	40.076.000			0 lokasi	40.076.000
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.671.989.100				3.671.989.100
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				3.631.989.000				3.631.989.000
2 14 03 2,01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				2.476.047.000				2.476.047.000
2 14 03 2,01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase pengelola KB/Kader yang mendapatkan informasi/pembinaan tentang Program KKBPK		0 %	2.476.047.000			0 %	2.476.047.000
2 14 03 2,03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.155.942.000				1.155.942.000
2 14 03 2,03 05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana penunjang kegiatan KB di tingkat lini lapangan (MUPEN 1 unit, tempat penyimpanan alokon 30 unit, laptop 1 set, pembangunan/alih fungsi gudang alokon 4 unit)		0 %	10.000.000			0 %	10.000.000
2 14 03 2,03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi (obat)		0 Akseptor	1.145.942.000			0 Akseptor	1.145.942.000
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				40.000.100				40.000.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 14 04 2,01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				40.000.100				40.000.100
2 14 04 2,01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase remaja yang mendapatkan informasi tentang Kesehatan Reproduksi		0 %	40.000.100			0 %	40.000.100
JUMLAH						9.579.639.000			9.579.639.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.529.992.840,00				4.071.749.438
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.939.927.190				3.488.790.238
2 09 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.835.360.000				2.467.751.048
2 09 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN (27 orang)		14 bulan	2.835.360.000			14 bulan	2.467.751.048
2 09 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				140.772.190				127.263.690
2 09 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan Baterai, Lampu, Stop Kontak yang diperlukan untuk Penerangan Kantor		1 Paket	2.573.000			3 Jenis	2.573.000
2 09 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK , Printer, Laptop yang diperlukan untuk pelaksanaan Tupoksi		12 Bulan	32.392.200			3 Jenis	25.903.200
2 09 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan serta Peralatan Rumah Tangga		1 Tahun	3.002.190			15 Jenis	3.002.190
2 09 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu		1 Tahun	14.100.000			1 Tahun	13.100.000
2 09 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy Dokumen, Jilid Dokumen, Pembuatan Liflet, Spanduk dan Dokumen		12 Bulan	8.620.800			1 Tahun	7.120.800
2 09 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah		12 Bulan	80.084.000			1 Tahun	75.564.500
2 09 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				869.735.000				806.375.000
2 09 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Materai dan Pengiriman Dokumen		0 Bulan	1.125.000			1 Tahun	1.125.000
2 09 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik dan telepon di lingkup Dinas Pangan dan Perikanan		0 Bulan	46.200.000			12 Bulan	46.200.000
2 09 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honor PA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan THL		0 bulan	822.410.000			12 bulan	759.050.000
2 09 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.060.000				87.400.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 09 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Dinas)		1 Unit	38.900.000			1 Unit	38.290.500
2 09 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak Roda 2 Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan Pajak Roda 4		0 Unit	51.100.000			20 Unit 5 Unit	45.050.000
2 09 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perawatan dan Perbaikan AC, Laptop dan Printer		0 Bulan	4.060.000			1 Tahun	4.060.000
2 09 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab		0 Unit	0			0 Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				1.601.187.400,00			1.458.530.700	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.555.276.700			1.422.076.700	
3 25 04 2,04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.555.276.700			1.422.076.700	
3 25 04 2,04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Benih Ikan beserta Pakan Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Nila , Lele dan Patin Pembangunan Kolam Air Tenang		1 Paket 16 Kelompok 1 Paket	1.112.025.000			1 Paket 16 Kelompok 1 Paket 978.825.000	
3 25 04 2,04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Balai Benih Ikan Aktif Jumlah Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul beserta Pakan Jumlah Sarana prasarana BBI yang direhab Jumlah sarana prasarana percontohan budidaya ikan		2 unit 3 Paket 2 Unit 0 kelompok	443.251.700			2 unit 3 Paket 2 Unit 0 kelompok 443.251.700	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				24.008.700			22.385.000	
3 25 05 2,01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				24.008.700			22.385.000	
3 25 05 2,01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Perikanan Tangkap yang terawasi		10 Kelompok	24.008.700			10 Kawasan 22.385.000	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				21.902.000			14.069.000	
3 25 06 2,03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				21.902.000			14.069.000	
3 25 06 2,03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pengembangan Usaha, Kelembagaan Pengolahan dan Pemasaran Ikan		2 Paket	21.902.000			2 Kali 14.069.000	
					6.131.180.240			5.530.280.138,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Ta Pe
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.795.115.680			
2 11 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.426.778.000			
2 11 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn (23 orang)		0 bulan 0 bulan	2.426.778.000			0 bulan 0 bulan
2 11 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.008.250			
2 11 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		0 JENIS	2.509.000			0 JENIS
2 11 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan makanan dan minuman		0 KEGIATAN	23.088.000			0 KEGIATAN
2 11 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (9 Jenis) = ((Disposisi surat, cetak spj, kwitansi NCR, map merk DLH, Baliho, Spanduk, leaflet, fotokopi dan jilid dokumen))		0 JENIS	6.000.000			0 JENIS
2 11 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah		0 tahun	110.411.250			0 tahun
2 11 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.170.554.430			
2 11 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0 jenis	51.090.000			0 jenis
2 11 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan jasa perbaikan peralatan kerja (5 Jenis) = (Komputer , Lapotop , printer , AC , server))		0 JENIS	135.055.380			0 JENIS
2 11 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan jasa transaksi keuangan		0 JENIS	984.409.050			0 JENIS
2 11 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.775.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Ta Pe
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
2 11 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinaan kendaraan dinas/ operasional (kendaraan roda 6, roda 4, roda 3 , roda 2)		0 UNIT	55.775.000			0 UNIT
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				503.149.000			
2 11 02 2,01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				503.149.000			
2 11 02 2,01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (2 Dokumen (1 draft RPPLH, 1 dok KLHS RPJMD))		0 dokumen	484.235.950			0 dokumen
2 11 02 2,01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup		2 dokumen	18.913.050			2 dokumen
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.179.594.200			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Ta Pe
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
2 11 03 2,01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				230.540.600			
2 11 03 2,01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik pantau kualitas air, udara dan tanah, dan Persentase Index Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = (22 titik pantau air, 11 titik pantau udara, 6 titik sampling tanah (IKLH 67,5%))		0 persen	70.243.600			0 persen
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah data monitoring dan evaluasi GRK dan pengawasan BPO pada usaha/kegiatan penghasil BPO (1 dokumen), 2 usaha/kegiatan dikec Sungai Rumbai, 2 usaha/kegiatan di kec. Koto Baru)			160.297.000			
		Jumlah jorong yang terlibat dalam pengembangan dampak perubahan						
		Jumlah kegiatan pendukung operasional laboratorium lingkungan (8 jenis kegiatan dan akreditasi labor)						
2 11 03 2,02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				949.053.600			
2 11 03 2,02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengadaan sarpras darkahutla (1 unit GPS, 2 unit motor, 1 unit ekskavator mini dan pemulihan kerusakan lingkungan untuk 3 kawasan)		4 jenis	949.053.600			4 jenis
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)				20.003.600			
2 11 04 2,01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				20.003.600			
2 11 04 2,01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dipelihara (7 kawasan (Pasar lama, Jalur dua lintas kantor bupati, pekarangan luar kantor bupati, komplek perkantoran sikabau, jalan jalur 2 Sport center))		7 kawasan	20.003.600			7 kawasan
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				14.250.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Ta Pe
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
2 11 05 2,01	Penyimpanan Sementara Limbah B3				14.250.000			
2 11 05 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 (20 usaha/ kegiatan, Fasyankes, Klinik)		0 KEGIATAN	14.250.000		0 KEGIATAN	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				46.400.100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Ta Pe
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
2 11 06 2,01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				46.400.100			
2 11 06 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah laporan hasil pengawasan dan kajian Jenis Usaha dan Kegiatan Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup thp usaha/kegiatan yang mengurus izin lingkungan		0 laporan 0 KEGIATAN	20.000.750		0 laporan 0 KEGIATAN	
2 11 06 2,01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan dan kajian Jenis Usaha dan Kegiatan		24 laporan	26.399.350	ya,	24 laporan	
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				26.806.000			
2 11 07 2,02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				26.806.000			
2 11 07 2,02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Nagari Prokasi/ Superkasih (1 Nagari (Koto Besar))		0 nagari	26.806.000		0 nagari	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				20.500.000			
2 11 09 2,01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.500.000			
	Penilaian Kinerja masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan Gerakan SUMBAR Bersih (1 kecamatan (1 kec. Sitiung) jumlah titik pantau sasaran penilaian Adipura (1 ibu kotabKab/Pl. Punjung (34 titik pantau, bibit tanaman dan tong sampah terpilah)			20.500.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Ta Pe
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				9.874.600			
2 11 10 2,01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				9.874.600			
2 11 10 2,01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup		0 KASUS	9.874.600		0 KASUS	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				559.744.600			
2 11 11 2,01	Pengelolaan Sampah				559.744.600			
2 11 11 2,01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase timbulan sampah yang tertangani (2,97% dan Kendaraan roda 6 , roda 3 ,mesin rumput, tong sampah/ container)		0 persen	559.744.600		0 persen	
		JUMLAH			6.175.437.780			

ahun 2021 setelah rubahan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6.175.437.780
3.795.115.680
2.426.778.000
2.426.778.000
142.008.250
2.509.000
23.088.000
6.000.000
110.411.250
1.170.554.430
51.090.000
135.055.380
984.409.050
55.775.000

ahun 2021 setelah rubahan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
55.775.000
503.149.000
503.149.000
484.235.950
18.913.050
1.179.594.200

ahun 2021 setelah rubahan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
230.540.600
70.243.600
160.297.000
949.053.600
949.053.600
20.003.600
20.003.600
20.003.600
14.250.000

thun 2021 setelah rubahan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
14.250.000
14.250.000
46.400.100

ahun 2021 setelah rubahan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
46.400.100
20.000.750
26.399.350
26.806.000
26.806.000
26.806.000
20.500.000
20.500.000

ahun 2021 setelah rubahan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9.874.600
9.874.600
9.874.600
559.744.600
559.744.600
559.744.600
6.175.437.780

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.898.859.900				4.347.426.360
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.874.963.900				4.308.894.360
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								49.082.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								13.146.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan		0 laporan				4 laporan	33.136.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2.800.000
2 12 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.839.314.000				2.380.689.960
2 12 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn (30 orang) pembayaran tambahan pengasilan asn (30 orang)		0 bulan 0 bulan	2.839.314.000			0 bulan 0 bulan	2.380.689.960
2 12 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0				99.292.000
2 12 01 2,05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				0	DAK Non Fisi Dana Pelayanan Administrasi Kependuduka			9.980.000
2 12 01 2,05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				0	DAK Non Fisi Dana Pelayanan Administrasi Kependuduka			89.312.000
2 12 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				165.820.000				673.093.000
2 12 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronik		0 Jenis	2.503.000			0 Jenis	2.503.000
2 12 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diperbaiki		0 Jenis 0 Jenis	30.172.000			0 Jenis 0 Jenis	442.498.000
2 12 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah belanja makan minum harian pegawai, rapat dan tamu		0 Jenis	12.000.000			0 Jenis	3.000.000
2 12 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		0 Jenis	8.700.000			0 Jenis	8.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Fasilitasi Kunjungan Tamu							9.880.000	
2 12 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti		0 kali	112.445.000			0 kali	206.512.000
2 12 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				731.051.900				986.518.900
2 12 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai		0 materai	3.931.900			0 materai	3.931.900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 12 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah belanja listrik . Air, VPN IP dan internet kantor listrik . Air, VPN IP dan lancarnya komunikasi kantor		0 Jenis	141.180.000			0 Jenis	141.180.000
2 12 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 tahun	44.310.000	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum		1 tahun	43.530.000
2 12 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium pengelola keuangan		0 Orang	541.630.000			0 Orang	797.877.000
2 12 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				138.778.000				120.218.500
2 12 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional		0 Unit 0 Unit	26.850.000			0 Unit 0 Unit	19.640.000
2 12 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik		0 Unit	56.928.000			0 Unit	45.578.500
2 12 01 2,09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor		0 Unit	55.000.000			0 Unit	55.000.000
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				622.042.500				0
2 12 02 2,01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				245.676.000				0
2 12 02 2,01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan KK		0 Persen	46.976.000	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisataa		100 Persen	0
2 12 02 2,01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan KK Persentase Kepemilikan KTP-el		0 Persen 0 Persen 0 Persen	0			0 Persen 0 Persen 0 Persen	0
2 12 02 2,01 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan pengaduan dan Informasi Kependudukan		0 Layanan	0			0 Layanan	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 12 02 2,01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kartu Identitas Anak Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga		0 Persen 0 Persen	198.700.000	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Kepariwisataa		70 Persen 100 Persen	0
2 12 02 2,02	Penataan Pendaftaran Penduduk				227.420.000				0

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 12 02 2,02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase KIA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	227.420.000	DAK Non Fisik-Dana ,Pelayanan Kepariwisataa		50 %	0
2 12 02 2,03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				148.946.500				0
2 12 02 2,03 01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		0 Kali	45.650.000			0 Kali	0
2 12 02 2,03 02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase KTP-el	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 %	93.825.000	yDa,AK Non Fisik-Dana ,Pelayanan Kepariwisataa		100 %	0
2 12 02 2,03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase KIA	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 %	9.471.500	yDa,AK Non Fisik-Dana ,Pelayanan Kepariwisataa		50 %	0
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				248.201.000				17.510.000
2 12 03 2,01	Pelayanan Pencatatan Sipil				112.450.000				17.510.000
2 12 03 2,01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Jumlah Pengurusan Akta Kematian Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		0 Lembar 0 Lembar 0 Persen	112.450.000			0 Lembar 0 Lembar 0 Persen	17.510.000
2 12 03 2,02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				135.751.000				0
2 12 03 2,02 03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	95 Persen	45.650.000	DAK Non Fisik-Dana ,Pelayanan Kepariwisataa		95 Persen	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 12 03 2,02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	95 %	81.111.000	DAK Non Fisik-Dana ,Pelayanan Kepariwisataa		95 %	0
2 12 03 2,02 08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	95 %	8.990.000	yDa,AK Non Fisik-Dana ,Pelayanan Kepariwisataa		95 %	0
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				151.852.500				19.222.000
2 12 04 2,01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				15.838.000				0
2 12 04 2,01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Akurasi Data Base Kependudukan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran		0 Persen 0 Persen	15.838.000			0 Persen 0 Persen	0
2 12 04 2,03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				136.014.500				19.222.000
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengendalian Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		15 kali	45.650.000			15 kali	19.222.000
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi Data Base Kependudukan		95%	80.744.500			95%	
2 12 04 2,03 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 dokumen	9.620.000	yDa,AK Non Fisik-Dana ,Pelayanan Kepariwisataa		5 dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 12 04 2,04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0				0
2 12 04 2,04 03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Bimtek PIAK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	10 kali	0	DAK Non Fisik- Dana ,Pelayanan Kepariwisataa	10 kali		0
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				1.800.000				1.800.000
2 12 05 2,01	Penyusunan Profil Kependudukan				1.800.000				1.800.000
2 12 05 2,01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Akurasi Data Base Kependudukan		0 Buku	1.800.000			0 Buku	1.800.000
JUMLAH									4.347.426.360,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				115.239.097.478		4.699.240.202	
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.421.761.470		3.177.228.874	
2 13 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0	
2 13 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra PD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	
2 13 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.588.674.000		2.369.358.004	
2 13 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn 25 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 25 orang		0 bulan 0 bulan	2.588.674.000	14 bulan 14 bulan	2.369.358.004	
2 13 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0	
2 13 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kaasitas sumberdaya aparatur		0 %	0	0 %	0	
2 13 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				175.020.470		219.434.570	
2 13 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpeliharanya 1 unit jaringan lisitrik		0 tahun	2.517.200	1 Unit	2.466.200	
2 13 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		0 %	49.810.720	1 Tahun	45.778.120	
2 13 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga kantor		0 jenis	2.481.050	0 jenis	2.891.050	
2 13 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makanan dan minuman rapat		0%	14.064.000	0%	21.180.000	
2 13 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya penggandaan dan barang cetakan		0 tahun	20.729.000	1 tahun	18.983.200	
2 13 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksana rapat koordinasi dan konsultasi		0 %	85.418.500	1 Tahun	128.136.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 13 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0			0
2 13 01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya mobil dinas roda 4		0 unit	0		0 unit	0
2 13 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeleur kantor		0 unit	0		0 unit	0
2 13 01 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya peralatan kantor (AC2, Laptop 4, UPS 5, TV satu, Genset 1 Unit)		0 jenis	0		0 jenis	0
2 13 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				493.190.000			445.685.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 13 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 3.000 Materai Rp. 6.000		0 %	5.760.000		95 Lembar 800 Lembar	5.085.000
2 13 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik		0 %	51.900.000		1 Tahun	41.100.000
2 13 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran jasa pelayanan umum kantor		0 %	435.530.000		1 tahun	399.500.000
2 13 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				164.877.000			142.751.300
2 13 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas jabatan		0 Unit	28.120.000		1 Unit	23.953.300
2 13 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional		0 %	112.440.000		10 unit	95.378.000
2 13 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanyaperalatan dan mesin kantor		0 %	9.317.000		25 unit	8.470.000
2 13 01 2,09 09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehabilitasi gedung kantor		0 unit	15.000.000		1 unit	14.950.000
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				58.921.250			55.758.850
2 13 03 2,01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa				58.921.250			55.758.850
2 13 03 2,01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan PKP		0 dokumen	0		0 dokumen	0
2 13 03 2,01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan KKN		0 %	31.273.750		4 Universita	28.111.350
2 13 03 2,01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan		0 dokumen	27.647.500		52 Nagari	27.647.500
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				110.956.545.858			679.054.878

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 13 04 2,01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				110.956.545.858			679.054.878
2 13 04 2,01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan aparatur nagari		0 nagari	120.071.660		52 nagari	228.872.010
2 13 04 2,01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pembinaan poengelolaan keuangan nagari		1 Tahun	110.244.553.630		1 Tahun	24.140.000
2 13 04 2,01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pembinaan Lembaga BumNag		0 bumnag	78.034.400		52 Lembaga	61.181.400
2 13 04 2,01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terpilihnnya Wali Nagari		0 nagari	472.421.318		43 nagari	323.586.468
2 13 04 2,01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pembinaan Nagari dalam menyusun Profil desa		0 nagari	41.464.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	52 nagari	41.275.000
2 13 04 2,01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen yang sesuai aturan		0 nagari	0		0 nagari	0
2 13 04 2,01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	palatihan anggota BPD se kabupaten	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	52 nagari	0	YAPE NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52 nagari	0
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				801.868.900			787.197.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 13 05 2,01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				801.868.900			787.197.600
2 13 05 2,01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan kelembagaan TP-PKK		0 lembaga	679.909.850		64 lembaga	679.909.850
2 13 05 2,01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan LPM dan Pokjanal/posyandu Nagari		0 nagari	99.940.550		52 nagari	87.289.750
2 13 05 2,01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lumbung Pangan Nagari		0 nagari	7.050.000		52 nagari	7.050.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 13 05 2,01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pembinaan kelembagaan TTG		0 lembaga	14.968.500		51 lembaga	12.948.000
JUMLAH						115.239.097,478		4.699.240.202,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				6.391.694.825				6.391.694.825
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.981.422.100				5.981.422.100
2 15 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.791.976.000				2.791.976.000
2 15 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn (34 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (34 orang)		0 bulan 0 bulan	2.791.976.000			0 bulan 0 bulan	2.791.976.000
2 15 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				172.346.100				172.346.100
2 15 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor		0 jaringan	2.417.500			0 jaringan	2.417.500
2 15 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		0 buah	15.000.000			0 buah	15.000.000
2 15 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor		0 jenis	2.500.600			0 jenis	2.500.600
2 15 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat		0 tahun	12.020.000			0 tahun	12.020.000
2 15 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		0 macam	60.157.000			0 macam	60.157.000
2 15 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah		0 tahun	80.251.000			0 tahun	80.251.000
2 15 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.837.020.000				2.837.020.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 15 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		0 JASA SURAT	3.000.000			0 JASA SURAT	3.000.000
2 15 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik		0 BULAN	112.500.000			0 BULAN	112.500.000
2 15 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		0 JASA	11.650.000			0 JASA	11.650.000
2 15 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lancarnya administrasi keuangan		0 12	2.709.870.000			0 12	2.709.870.000
2 15 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180.080.000				180.080.000
2 15 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		0 TAHUN	20.000.000			0 TAHUN	20.000.000
2 15 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional		0 unit	160.080.000			0 unit	160.080.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				410.272.725				410.272.725
2 15 02 2,02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				147.986.125				147.986.125
2 15 02 2,02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang marka ja / 2500 m2 (1 pkt (marka center line 12.500 m, mar full line 50.000 m, pita pengaduh 2,600 m, zebrecross 1.800 m, stop 1 350 m)) Jumlah panjang pagar pengaman jalan Jumlah panjang pagar pengaman jalan Jumlah tersedianya ramb rambu lalu lintas = (kec. Tiumang, koto besar, kot salak, kec sitiung, sungai rumbai, Timpeh. P. Punju pdg laweh, kt baru - 150 b + (440 bh (rambu perintah,larangan,peringa (400 bh),rambu petunjuk bh)) Jumlah zoss yang terpasa di ruas jalan nasional dan kab. Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas (Ram Rambu Perintah,Petunjuk dan Rambu Larangan) Terpasangnya warning lif tenaga surya		0 paket 0 meter 0 meter 0 unit 0 meter 41 unit 0 titik	78.632.000		0 paket 0 meter 0 meter 0 unit 0 meter 41 unit 0 titik	78.632.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 15 02 2,02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kelengkapan Jalan Yang Sudah Terpasang Secara Berkala		0 paket	69.354.125			0 paket	69.354.125
2 15 02 2,05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				140.000.000				140.000.000
2 15 02 2,05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah terpelihara dan meningkatnya kondisi alat pengujian kendaraan bermotor di UPKB dinas perhubungan		0 alat	140.000.000			0 alat	140.000.000
2 15 02 2,06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				20.095.000				20.095.000
2 15 02 2,06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Komunikasi dan Sinkronisasi Kegiatan Antara Pemangku Kepentingan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 kali	20.095.000	Dana Transfer Umum- ,Dana Alokasi Umum		12 kali	20.095.000
2 15 02 2,08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				102.191.600				102.191.600
2 15 02 2,08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Serta Inspeksi Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Di Wilayah Kab. Dharmasraya		12 Bulan	102.191.600			12 Bulan	102.191.600
JUMLAH					6.391.694.825				6.391.694.825,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.822.039.276			4.822.039.276	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.229.788.276			4.229.788.276	
2 16 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.152.514.168			3.152.514.168	
2 16 01 2,02 9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn (20 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (20 orang)		0 bulan	3.152.514.168		0 bulan	3.152.514.168	
2 16 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				106.603.900			106.603.900	
2 16 01 2,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bagunan kantor		0 komponen	4.046.000		0 komponen	4.046.000	
2 16 01 2,06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor Jumlah peralatan kantor yang tersedia		0 jenis	1.328.900		0 jenis	1.328.900	
2 16 01 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jamuan Makan Rapat Koordinasi Jumlah jamuan makan Rapat staf Jumlah jamuan makan rapat tamu		0 kali	11.720.000		0 kali	11.720.000	
2 16 01 2,06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yg tersedia Jumlah Penggandaan yang tersedia		0 jenis	10.231.000		0 jenis	10.231.000	
2 16 01 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar daerah Jumlah Kordinasi dan Konsultasi Luar daerah		0 kali	79.278.000		0 kali	79.278.000	
2 16 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				934.763.208			934.763.208	
2 16 01 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah materai 3000 yang tersedia Jumlah materai 6000 yang tersedia Pengiriman paket		0 lembar 0 lembar 0 lembar	3.250.000		0 lembar 0 lembar 0 lembar	3.250.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 16 01 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line internet (1 unit astinet, 17 Modem, 3 Speedy dan 4 Indihome) Jumlah rekening listrik		0 unit 0 rekening listrik	516.084.984			0 unit 0 rekening listrik	516.084.984
2 16 01 2,08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara		0 jenis	15.238.224			0 jenis	15.238.224
2 16 01 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honorarium ASN		0 bulan	400.190.000			0 bulan	400.190.000
2 16 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.907.000				35.907.000
2 16 01 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara Jumlah STNK Kendaraan Roda 4 yang diperbaharui		0 unit 0 unit	29.977.000			0 unit 0 unit	29.977.000
2 16 01 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara		0 gedung 0 jenis	5.930.000			0 gedung 0 jenis	5.930.000
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UBLIK				301.001.000				301.001.000
2 16 02 2,01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				301.001.000				301.001.000
2 16 02 2,01 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah masyarakat yang teryalani di Media Center Diskominfo		0 unit	197.012.000			0 unit	197.012.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 16 02 2,01 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Prosentasi pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi		0 tower	53.996.000			0 tower	53.996.000
2 16 02 2,01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah aparatur pemerintah yang dilatih		0 orang	49.993.000			0 orang	49.993.000
2 16 03 2,02	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				291.250.000				291.250.000
2 16 03 2,02	Pengelolaan e government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				291.250.000				291.250.000
2 16 03 2,02 4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Informasi OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya		0 si OPD	291.250.000			0 si OPD	291.250.000
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				118.058.600				118.058.600
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				118.058.600				118.058.600
2 20 02 2,01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota				118.058.600				118.058.600
2 20 02 2,01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Banyaknya Data dan Informasi Statistik Sektoral Jumlah Buku DDA, Buku PDRB, Buku Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Dianalisis Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Diolah		0 dok 0 dok 0 dok 0 dok	38.855.500			0 dok 0 dok 0 dok 0 dok	38.855.500
2 20 02 2,01 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Bank Data Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya		0 dokumen	38.383.000			0 dokumen	38.383.000
2 20 02 2,01 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Forum Data dan Dharmasraya Satu Data		0 kegiatan	40.820.100			0 kegiatan	40.820.100
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				74.790.000				74.790.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 21 02 2,01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				74.790.000			74.790.000	
2 21 02 2,01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memahami sistem persandian daerah Jumlah OPD yang menerapkan Sertifikat Digital untuk menjamin keasliat/keabsahan dokument elektronik		0 OPD 0 OPD	74.790.000			0 OPD 0 OPD 74.790.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
JUMLAH					5.014.887.876			5.014.887.876,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.318.035.994			3.716.356.940	
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.827.719.694			3.226.040.640	
2 17 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.480.162.000			1.878.482.946	
2 17 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 21 orang, terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 21 orang	Kab. Dharmasra Pulau Punjung, Sungai Kambut	0 bulan 0 bulan	2.480.162.000		1 Tahun 1 Tahun	1.878.482.946	
2 17 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				167.547.690			167.547.690	
2 17 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0 Bulan	5.966.000		0 Bulan	5.966.000	
2 17 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		0 bulan	22.555.340		0 bulan	22.555.340	
2 17 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		0 Bulan	6.970.250		0 Bulan	6.970.250	
2 17 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat dan tamu		0 Bulan	17.023.000		0 Bulan	17.023.000	
2 17 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		0 Bulan	19.892.100		0 Bulan	19.892.100	
2 17 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur		0 Bulan	0		0 Bulan	0	
2 17 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 Bulan	95.141.000		0 Bulan	95.141.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 17 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.580.000				17.580.000
2 17 01 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor		0 unit	17.580.000			0 unit	17.580.000
2 17 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.108.600.004				1.108.600.004
2 17 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 bulan	5.010.000			0 bulan	5.010.000
2 17 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		0 bulan	200.000.004			0 bulan	200.000.004
2 17 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor		0 bulan 0 Bulan	903.590.000			0 bulan 0 Bulan	903.590.000
2 17 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53.830.000				53.830.000
2 17 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan mobil jabatan (kepala dinas)		0 unit	25.000.000			0 Unit	25.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 17 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional		0 unit	17.500.000			0 Unit	17.500.000
2 17 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja		0 Unit	11.330.000			0 Unit	11.330.000
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				52.252.300				52.252.300
2 17 04 2,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				52.252.300				52.252.300
2 17 04 2,01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi		40 Koperasi	52.252.300			40 Koperasi	52.252.300
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				197.379.000				197.379.000
2 17 05 2,01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				197.379.000				197.379.000
2 17 05 2,01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih dalam manajemen usaha dan kelembagaan koperasi		60 orang	197.379.000			60 orang	197.379.000
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				240.685.000				240.685.000
2 17 07 2,01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				240.685.000				240.685.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 17 07 2,01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dalam perkuatan permodalan		90 UMKM	47.760.000			90 UMKM	47.760.000
2 17 07 2,01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro (potensial) yang difasilitasi dan dibina dalam pengembangan usaha		90 UMK	192.925.000			90 UMK	192.925.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				149.991.075				149.991.075

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				18.597.700			18.597.700	
3 30 03 2,02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				18.597.700			18.597.700	
3 30 03 2,02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase penerimaan retribusi pasar		0 Persen	18.597.700		0 Persen	18.597.700	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				31.399.210			31.399.210	
3 30 04 2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				31.399.210			31.399.210	
3 30 04 2,02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya laporan perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di tingkat pasar		0 Laporan	31.399.210		0 Laporan	31.399.210	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				99.994.165			99.994.165	
3 30 06 2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				99.994.165			99.994.165	
3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang dan bertanda tera sah		0 Alat UTTP	74.146.455		0 Alat UTTP	74.146.455	
3 30 06 2,01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pemilik alat UTTP yang akan ditera ulang dan bertanda tera sah		0 Alat UTTP	25.847.710		0 Alat UTTP	25.847.710	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				681.972.700			681.972.700	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				610.777.650			610.777.650	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3 31 02 2,01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				610.777.650			610.777.650	
3 31 02 2,01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang dibina melalui Promosi produk kerajinan daerah Pengembangan SDM dan Operasional Sentra IKM Logam Peningkatan nilai tambah IKM Batik Tanah Liat		1 Event 10 IKM 1 Paket	610.777.650		1 Event 10 IKM 1 Paket	610.777.650	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				31.534.500			31.534.500	
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				31.534.500			31.534.500	
3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpantaunya IKM Dalam Limbah, Legalitas dan Pemakaian bahan tambahan makanan		0 IKM	31.534.500		0 IKM	31.534.500	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				39.660.550			39.660.550	
3 31 04 2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				39.660.550			39.660.550	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3 31 04 2,01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Legalitas IKM Pangan		0 IKM	39.660.550			0 IKM	39.660.550
JUMLAH						5.149.999.769			4.548.320.715,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.987.170.650				3.037.170.650
2 18 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.095.358.000				2.095.358.000
2 18 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 20 orang terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 20 orang			2.095.358.000				2.095.358.000
2 18 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				171.859.650				171.859.650
2 18 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk instalasi listrik/penerangan kantor			3.994.200				3.994.200
2 18 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan alat tulis			33.855.900				33.855.900
2 18 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah biaya pengeluaran untuk alat2 kebersihan dan honorarium petugas K3 Jumlah biaya pengeluaran untuk pembelian peralatan rumah tangga		0 bulan 0 bulan	5.995.600			0 bulan 0 bulan	5.995.600
2 18 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah biaya pengeluaran untuk penyediaan makan minum		0 bulan	18.405.000			0 bulan	18.405.000
2 18 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah barang cetakan dan peggandaan		0 bulan	15.439.100			0 bulan	15.439.100
2 18 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi		0 bulan	94.169.850			0 bulan	94.169.850
2 18 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				32.000.000				32.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 18 01 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang disediakan		0 Unit	32.000.000			0 Unit	32.000.000
2 18 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				645.223.000				645.223.000
2 18 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya pengeluaran untuk tagihan listrik, air dan telpon/internet		0 bulan	116.580.000			0 bulan	116.580.000
2 18 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya honorarium bendahara, dan penyelenggara keuangan		0 bulan	528.643.000			0 bulan	528.643.000
2 18 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				42.730.000				92.730.000
2 18 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang diperpanjang STNK dan dibayarkan pajaknya Terpeliharanya mobil jabatan (kepala dinas)		0 unit 0 unit	18.250.000			0 unit 0 unit	18.250.000
2 18 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diservice/dipelihara		0 unit	20.500.000			0 unit	20.500.000
2 18 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diperbaiki dan honorarium jasa perbaikan/service		0 Unit	3.980.000			0 Unit	3.980.000
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				100.001.800				100.001.800
2 18 02 2,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100.001.800				100.001.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 18 02 2,02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 dokumen	100.001.800	Dana yTransfer Umum- ,Dana Alokasi Umum		1 dokumen	100.001.800
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				432.400.300				432.400.300
2 18 03 2,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				432.400.300				432.400.300
2 18 03 2,01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dan pameran investasi di dalam dan luar negeri yang diikuti/ diselenggarakan		0 kali	432.400.300			0 kali	432.400.300
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				35.071.250				35.071.250
2 18 04 2,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				35.071.250				35.071.250
2 18 04 2,01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu Terselenggaranya Aplikasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik		0 dokumen 0 persen	35.071.250			0 dokumen 0 persen	35.071.250
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				326.012.020				326.122.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 18 05 2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				326.012.020			326.122.000	
2 18 05 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		0 kali	0			60 perusahaan 48.300.000	
2 18 05 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah bimtek sosialisai kemudahan berusaha Jumlah penyelesaian masalah dan hambatan pelaksanaan penanaman modal		0 kali 0 kegiatan	326.012.020			208 pelaku usaha 0 kegiatan 181.222.000	
2 18 05 2,01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah poengawasan pelaksanaan penanaman modal		0 kali	0	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		55 kali 96.600.000	
JUMLAH					3.880.656.020			3.930.766.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1.241.032.900			1.241.032.900	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				155.856.500			155.856.500	
2 19 02 2,01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			0	155.856.500		0	155.856.500	
2 19 02 2,01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Parsenstasi Peningkatan Pemberdayaan Pemuda		0 Persen	108.216.500		0 Persen	108.216.500	
2 19 02 2,01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	terpilihnya anggota paskibra kab. Dharmasraya		0 Kegiatan	47.640.000		0 Kegiatan	47.640.000	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				1.010.176.400			1.010.176.400	
2 19 03 2,02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000			100.000.000	
2 19 03 2,02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabor yang difasilitasi		0 Cabor	100.000.000		0 Cabor	100.000.000	
2 19 03 2,03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				150.000.000			150.000.000	
2 19 03 2,03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Klub yang mengikuti kompetensi		0 kegiatan	150.000.000		0 kegiatan	150.000.000	
2 19 03 2,05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				760.176.400			760.176.400	
2 19 03 2,05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah pembangunan sarana olahraga Jumlah Prasarana Olahraga		0 unit 0 paket	760.176.400		0 unit 0 paket	760.176.400	
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				75.000.000			75.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 19 04 2,01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				75.000.000				75.000.000
2 19 04 2,01 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	terfasilitasinya KML Bagi pembina dan persiapan jambore Pramuka Daerah		0 kegiatan	75.000.000			0 kegiatan	75.000.000
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.173.089.950				6.173.089.950
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.674.060.350				3.674.060.350
2 22 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.114.000				36.114.000
2 22 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra PD		0 dokumen	36.114.000			0 dokumen	36.114.000
2 22 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.486.670.000				2.486.670.000
2 22 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN (23 orang) pembayaran tambahan penghasilan PNS (23 orang)		0 bulan 0 bulan	2.486.670.000			0 bulan 0 bulan	2.486.670.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 22 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.548.050				214.548.050
2 22 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan alat- alat listrik		0 item	5.144.400			0 item	5.144.400
2 22 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis alat tulis kantor		0 bulan	28.207.000			0 bulan	28.207.000
2 22 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan makan dan minum kantor		0 bulan	16.900.000			0 bulan	16.900.000
2 22 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan		0 jenis	11.200.000			0 jenis	11.200.000
2 22 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait		0 bulan	153.096.650			0 bulan	153.096.650
2 22 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				866.100.000				866.100.000
2 22 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, telepon dan penambahan daya		0 bulan	168.000.000			0 bulan	168.000.000
2 22 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		0 bulan	12.750.000			0 bulan	12.750.000
2 22 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai yang menerima honor		0 bulan	685.350.000			0 bulan	685.350.000
2 22 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.628.300				70.628.300
2 22 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan jabatan		1 unit	18.500.000			1 unit	18.500.000
2 22 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan operasional (roda 4@1 unit, roda 2@4 unit)		5 unit	46.000.000			5 unit	46.000.000
2 22 01 2,09 05	Pemeliharaan Mebel	umlah peralatan yang diperbaiki		0 Jenis	-			0 jenis	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 22 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan gedung		0 unit	6.128.300			0 unit	6.128.300
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.953.367.350				1.953.367.350
2 22 02 2,01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.760.000.000				1.760.000.000
2 22 02 2,01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Jumlah Rumah Beradaban yang berhasil dikembangkan Pembinaan perkembangan multi etnis di kabupaten Dharmasraya Terlaksananya Penyusunan dan pengumpulan bahan pembuatan dokument budaya dan sejarah dharmasraya terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri terlaksananya pembangunan pengelolaan kebudayaan daerah		0 bulan 0 unit 0 bulan 0 dokumen 0 unit 0 kegiatan	1.760.000.000			0 bulan 0 unit 0 bulan 0 dokumen 0 unit 0 kegiatan	1.760.000.000
2 22 02 2,01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	terlaksananya workshop		0 kegiatan	-			0 kegiatan	-
2 22 02 2,03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				193.367.350				193.367.350
2 22 02 2,03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	terlaksananya Pelestarian adat dan budaya		0 jenis	193.367.350			0 jenis	193.367.350
2 22 02 2,03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Tokoh adat yang dibina Terfasilitasinya kegiatan bundo kandung kab. Dharmasraya Terlaksananya lomba pidato adat tingkat prlajar		0 lembaga 0 orang 0 orang	-			0 lembaga 0 orang 0 orang	-
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				486.939.750				486.939.750

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 22 03 2,01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				486.939.750			486.939.750	
2 22 03 2,01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	terlaksanananya pendidikan dan pelatihan pelaku dan sanggar seni Terlaksananya event budaya daerah terlaksananya festival budaya daerah luar dan dalam negeri Terlaksananya silek art festival di dharmasraya		0 bulan 0 event 0 bulan 0 kegiatan	486.939.750		0 bulan 0 event 0 bulan 0 kegiatan	486.939.750	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				58.722.500			58.722.500	
2 22 05 2,01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				58.722.500			58.722.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 22 05 2,01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		0 kawasan	58.722.500			0 kawasan	58.722.500
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				296.151.150				296.151.150
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				178.476.500				178.476.500
3 26 02 2,02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				178.476.500				178.476.500
3 26 02 2,02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana yang dibangun		0 unit	178.476.500			0 unit	178.476.500
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				86.235.000				86.235.000
3 26 03 2,01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				86.235.000				86.235.000
3 26 03 2,01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya partisipasi pada event in a craft Terlaksananya partisipasi seni dan budaya TMII pada acara ekonomi kreatif di BP TMII terlaksananya pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kab. Dharmasraya terlaksananya promosi pariwisata Kab. Dharmasraya terlaksananya promosi pariwisata Kab. Dharmasraya terlaksananya tour d singkarak Terpilihnya Pasangan Uda-Uni Kab. Dharmasraya		0 kegiatan 0 kegiatan 0 orang 0 bulan 0 event 0 kegiatan 0 orang	86.235.000			0 kegiatan 0 kegiatan 0 orang 0 bulan 0 event 0 kegiatan 0 orang	86.235.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
3 26 03 2,01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	terlaksananya pemetaan dan inventarisasi usaha ekonomi kreatif seni dan budaya		0 pelaku	-			0 pelaku	-
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				31.439.650				31.439.650
3 26 05 2,01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				31.439.650				31.439.650
3 26 05 2,01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	terlaksananya kegiatan dan pengembangan gerakan sadar wisata terlaksananya pembentukan forum komunikasi		0 orang 0 bulan	31.439.650			0 orang 0 bulan	31.439.650
JUMLAH						7.710.274.000			7.710.274.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				3.917.539.657				4.217.539.657
2 23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.662.510.157				3.662.510.157
2 23 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.694.234.000				2.694.234.000
2 23 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn 24 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 24 orang		0 Bulan	2.694.234.000			0 Bulan	2.694.234.000
2 23 01 2,06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah				127.694.157				127.694.157
2 23 01 2,06 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		0 bulan	3.997.407			0 bulan	3.997.407
2 23 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		0 bulan	24.758.900			0 bulan	24.758.900
2 23 01 2,06 04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		0 bulan	0			0 bulan	0
2 23 01 2,06 05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia		0 bulan	12.120.000			0 bulan	12.120.000
2 23 01 2,06 06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		0 bulan	6.037.400			0 bulan	6.037.400
2 23 01 2,06 07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi aparatur		0 bulan	0			0 bulan	0
2 23 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia		0 bulan	80.780.450			0 bulan	80.780.450
2 23 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				348.350.000				348.350.000
2 23 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mobeleur gedung kantor		0 jenis	35.000.000			0 jenis	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 23 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan cetak (DAK) Tersedianya peralatan komputer lainnya (DAK) Tersedianya peralatan personal komputer (DAK) Tersedianya peralatan studio gambar (DAK) Tersedianya personal komputer, Printer (APBD)		1 unit 7 unit 30 set/ unit 2 unit 2 unit	313.350.000			1 unit 7 unit 30 set/ unit 2 unit 2 unit	313.350.000
2 23 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				378.470.000				378.470.000
2 23 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik yang tersedia			20.880.000			0 bulan	20.880.000
2 23 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium non ASN Tersedianya Jasa pengelolaan administrasi keuangan yang tersedia		12 bulan 11 bulan	357.590.000			12 bulan 11 bulan	357.590.000
2 23 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				113.762.000				113.762.000
2 23 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan jabatan	Kab. Dharmasra Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 unit	27.504.000	ya,		1 unit	27.504.000
2 23 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang dipelihara Perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia		7 unit 7 unit	31.468.000			7 unit 7 unit	31.468.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 23 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja		7 unit	4.790.000			7 unit	4.790.000
2 23 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (sewa gedung kantor)		1 unit	50.000.000			1 unit	50.000.000
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				255.029.500				555.029.500
2 23 02 2,01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				233.250.000				533.250.000
2 23 02 2,01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Elektronik di Kabupaten/TIK	Kab. Dharmasraya Pulau Punjung, Sungai Da		0	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		40 unit	300.000.000
2 23 02 2,01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemustaka sekolah, nagari, dan TBM		1000 pemus	33.250.000			1000 pemus	33.250.000
2 23 02 2,01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya bahan bacaan perpustakaan daerah		2.068 eksem	200.000.000			2.068 eksem	200.000.000
2 23 02 2,02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				21.779.500				21.779.500
2 23 02 2,02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Koordinasi Pengembangan Perpustakaan (IPI)		0 orang	21.779.500			0 orang	21.779.500
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				60.000.000				60.000.000
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				60.000.000				60.000.000
2 24 02 2,01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				39.965.000				39.965.000
2 24 02 2,01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kearsipan		0 OPD	14.565.000			0 OPD	14.565.000
2 24 02 2,01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah Kabupaten Dharmasraya yang tertata untuk siap disimpan		0 daftar arsip (OPD)	25.400.000			0 daftar arsip (OPD)	25.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah Perubahan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 24 02 2,02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				20.035.000				20.035.000
2 24 02 2,02 02	Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Jumlah SDM OPD, senag, UPT, SD/MI, SLTP pengelola aset daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan Arsip Aset		0 Orang	20.035.000				20.035.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				23.078.188.098			20.338.608.848	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.758.019.030			13.277.638.980	
3 27 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.305.792.000			10.967.417.000	
3 27 01 2,02 0,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 141 orang terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan PNS sebanyak 147 orang		14 bulan 14 bulan	12.305.792.000		14 bulan 14 bulan	10.967.417.000	
3 27 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				255.561.430			392.856.380	
3 27 01 2,06 0,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan instalasi listrik / penerangan		0 Jenis	8.625.000		3 Jenis	8.625.000	
3 27 01 2,06 0,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	umlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan Jumlah Pemeliharaan Sarana Kantor Jumlah penyediaan Kebutuhan kerja		1 Jenis	74.129.380		1207 Bulan 20 Unit 28 Jenis	83.726.380	
3 27 01 2,06 0,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum yang Disediakan		1 Bks	34.500.000		2300 Bks/Kotak	34.500.000	
3 27 01 2,06 0,5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1 Jenis	37.000.000		21100 Buah	37.000.000	
3 27 01 2,06 0,9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan dan diikuti		1 Bulan	101.307.050		120 Kegiatan	229.005.000	
3 27 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.822.865.600			1.583.565.600	
3 27 01 2,08 0,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan layanan jasa listrik gedung kantor		0 bulan	68.400.000		12 Bulan	68.400.000	
3 27 01 2,08 0,3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1 Jenis	5.165.600		16 Bulan	5.165.600	
3 27 01 2,08 0,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pengelolaan keuangan dan jasa pengelolaan operasional kegiatan Jumlah penyediaan jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan kantor Jumlah penyediaan jasa Tenaga Sopir kantor Jumlah penyediaan jasa tenaga teknis Pertanian dan Pangan		1 Bulan 0 Bulan	1.749.300.000		253 Orang/Bulan 9660 Orang/Hari 22 Orang/Bulan 560 Orang/Bulan	1.510.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
3 27 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				373.800.000			333.800.000	
3 27 01 2,09 0,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara Jumlah penyediaan jasa surat-surat perizinan kendaraan dinas		0 Unit	26.500.000		1 Unit	21.500.000	
3 27 01 2,09 0,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasiona		0 Unit	347.300.000		182 Unit	312.300.000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.546.304.750			662.149.750	
3 27 02 2,01 0,1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				45.450.000			35.515.000	
3 27 02 2,01 0,2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan peredaran pupuk bersubsidi		4 Jenis	21.225.000		10 Kegiatan	16.405.000	
3 27 02 2,01 0,3	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Brigade Alsintan dan Alsintan yang dikelola Pendampingan PUAP Pendampingan UPJA		0 unit 0 PUAP 0 UPJA	24.225.000		1 unit 2 PUAP 2 UPJA	19.110.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota				242.835.000				217.835.000
	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit sayur dan buah yang dilestarikan		4 Jenis	42.635.000				17.635.000
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit/benih tanaman yang diberikan kemasyarakat			200.200.000				200.200.000
	Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota lainnya				1.258.019.750				408.799.750
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Mesin Tetas yang disediakan Jumlah Suku Cadang alat Pertanian/peternakan/ke Jumlah ternak yang diber pada masyarakat		1 jenis , 6 jenis, 13 ekor	1.258.019.750				408.799.750
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				6.158.822.000				5.666.896.800
3 27 03 2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian				6.158.822.000				5.666.896.800
3 27 03 2,02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Peningkatan Air Irigasi Pertanian	Kab. Dharmasra Pulau Punjung, Tebing Tin Kab. Dharmasra Pulau Punjung, Gunung Selasih Kab. Dharmasra Sitiung, Siguntur	3 unit	648.979.700	ya, sspEi NDAPATAN ASLI DAERAH y(aP,AD) Dana Transfe Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik ya,		3 unit	648.979.700
3 27 03 2,02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung		2 unit	114.000.000			1 unit	114.000.000
3 27 03 2,02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Produksi yang terbangun dan terpelihara Jumlah JUT yang terbangun dan terpelihara		3 Unit 5 Unit	3.792.940.300			20 Unit 2 Unit	3.299.125.300
3 27 03 2,02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Damparit yang terbangun dan terpelihara		0 Unit	228.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	228.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
3 27 03 2,02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Penyediaan saran pendukung Kantor BP3K/BPP Jumlah Rehab dan Renovasi Kantor BP3K/BPP		9 Unit	1.061.792.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		11 Jenis 9 Unit	1.063.682.000
3 27 03 2,02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	bongkar pasang mesin dryer dan transportasi pemindahan dari pasaman ke dharmasraya pembangunan gedung mesin dryer		1 unit 1 unit	313.110.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 unit 1 unit	313.109.800
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				52.242.850				175.428.850

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
3 27 06 2,02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				52.242.850			175.428.850	
3 27 06 2,02 01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Operasional Pasar Ternak Pengadaan bahan kimia peternakan		0 unit	52.242.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit 4900 dosis	175.428.850	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				562.799.468			556.494.468	
3 27 07 2,01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				562.799.468			556.494.468	
3 27 07 2,01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peningkatan laporan kelembagaan Penyuluh Jumlah program tingkat nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta dokumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)		0 Orang 0 Dok	248.710.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	11 BPP 0 Dok	244.406.100	
3 27 07 2,01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang tersedia		6 Unit	314.089.368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	15 jenis	312.088.368	
JUMLAH					23.078.188.098			20.338.608.848	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				234.315.200			234.315.200	
2 7 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				45.934.700			45.934.700	
2 7 02 2,01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				45.934.700			45.934.700	
2 07 02 2,01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun		0 dokumen	45.934.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 dokumen	45.934.700	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				120.347.500			120.347.500	
2 07 03 2,01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				120.347.500			120.347.500	
2 07 03 2,01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan untuk Angkatan Kerja yang dilaksanakan		0 Pencaker	120.347.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Paket	120.347.500	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				26.221.000			26.221.000	
2 07 04 2,03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				26.221.000			26.221.000	
2 07 04 2,03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pelayanan Antar Kerja yang tersedia		0 Informasi	26.221.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Kegiatan	26.221.000	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				41.812.000			41.812.000	
2 07 05 2,01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				17.635.000			17.635.000	
2 07 05 2,01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan dan PKB yang disahkan		0 Kali	17.635.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 PP/PKB	17.635.000	
2 07 05 2,02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				24.177.000			24.177.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
2 07 05 2,02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelesaian kasus pada perusahaan		0 kasus	24.177.000			10 kasus	24.177.000
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				3.319.876.360				3.446.680.360
3 32 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.275.183.360				3.401.987.360
3 32 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.990.000				20.990.000
3 32 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang tersusun		0 Laporan	20.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	20.990.000
3 32 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.509.463.956				2.509.463.956
3 32 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn (27 orang) pembayaran tambahan penghasilan asn (27 orang)		0 bulan 0 bulan	2.509.463.956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 bulan 1 Tahun	2.509.463.956

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
3 32 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				166.419.800			242.773.800	
3 32 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia		0 Buah	6.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 Buah	6.840.000	
3 32 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		0 Bulan	45.867.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	45.867.000	
3 32 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia		0 Bulan	16.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	16.320.000	
3 32 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia		0 Bulan	15.746.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	15.746.800	
3 32 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Bulan	81.646.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	158.000.000	
3 32 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				522.169.604			572.619.604	
3 32 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Air dan Listrik yang dibayarkan		0 Bulan	85.199.604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Bulan	85.199.604	
3 32 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor Tenaga Administrasi, tenaga Kebersihan, dan Tenaga Keamanan serta Sopir Jumlah pembayaran Transaksi Honor Pengelola Keuangan		0 Bulan 0 Bulan	436.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Bulan 11 Bulan	487.420.000	
3 32 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.140.000			56.140.000	
3 32 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		0 kendaraan	4.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 kendaraan	4.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
3 32 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0 Unit	42.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 unit	42.500.000
3 32 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mesin dan lainnya yang tersedia		0 unit	9.140.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 unit	9.140.000
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				44.693.000				44.693.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
3 32 04 2,01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				44.693.000				44.693.000
3 32 04 2,01 01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah KK pada kawasan transmigrasi yang dibina		0 KK	44.693.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 KK	44.693.000
JUMLAH					3.554.191.560				3.680.995.560

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.717.395.816	27.092.347.098	27.092.347.098,00			27.092.347.098
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.053.261.996				8.053.261.996
4 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan asn 70 orang pembayaran tambahan penghasilan asn 70 orang		14 bulan 14 bulan	8.053.261.996	Dana yTar,ansfer Umum - ,Dana Alokasi Umum		14 bulan 1 tahun	8.053.261.996
4 01 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000.000				100.000.000
4 01 01 2,03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jaminan barang milik daerah		42 unit	100.000.000	³P²E²NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42 unit	100.000.000
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.754.871.550	2.754.871.550,00			2.754.871.550
4 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen dan pemeliharaan jaringan/ instalasi listrik kantor		12 bln	184.603.000	³P²E²NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	184.603.000
4 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor		0 bln 12 bln	207.152.900	³P²E²NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 bln 12 bln	207.152.900
4 01 01 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga		12 bln	30.312.850	³P²E²NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	30.312.850
4 01 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat kantor		12 bln	1.678.188.000	ya,		12 bln	1.678.188.000
4 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, jilid dan fotokopi		12 bln	91.100.000	³P²E²NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	91.100.000
4 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat dan konsultasi yang diikuti		12 bln	563.514.800	³P²E²NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	563.514.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.201.550.000	3.201.550.000,00			3.201.550.000
4 01 01 2,07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan Bupati		2 unit	2.200.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 unit	2.200.750.000
4 01 01 2,07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional roda 2 Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4		2 unit 1 unit	855.800.000	^y P ^e NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 unit 3 unit	855.800.000
4 01 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Kursi Biasa Kursi Kerja Wakil Bupati Kursi Meja Rapat Wakil Bupati Meja Kerja Wakil Bupati Podium		6 pkt	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80 Unit 1 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit	65.000.000
4 01 01 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aquarium Ikan Ikan Arwana Komputer PC Mic Rapat Mic Wireless Tangga		4 pkt	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit 1 Paket 2 Ekor 1 Unit 1 Set 1 Unit 1 Unit	80.000.000
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.361.938.000	5.361.938.000,00			5.361.938.000
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya		12 bln	30.800.000	^y P ^e NDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Tahun	30.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, listrik dan air		12 bln	725.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	725.000.000
4 01 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa sewa Peralatan dan perlengkapan kantor		12 bln	514.338.000	³ PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	514.338.000
4 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honor pengelola keuangan, PTT dan THL Honor tenaga kebersihan		12 bln 12 bulan	4.091.800.000	³ PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 bln 12 bulan	4.091.800.000
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.763.481.000				1.763.481.000
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan jabatan		5 unit	242.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 unit	242.840.000
4 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin kendaraan dinas		69 unit 85 unit	921.721.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		69 unit 85 unit	921.721.000
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan peralatan kerja (AC) Perbaikan peralatan kerja (AC Standing) Perbaikan peralatan kerja (Genset) Perbaikan peralatan kerja (PC) Perbaikan peralatan kerja (Peralatan Studio) Perbaikan peralatan kerja (Printer)		12 bln	63.920.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68 Unit 12 Unit 1 Unit 14 Unit 1 Tahun 5 Unit	63.920.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
4 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemasangan Kanopi Rumah Dinas Bupati Pemasangan Keramik Tempat Parkir dan Pembangunan Ruang Studio Rumah Dinas Bupati Pembuatan WC, Kanopi, Paving Blok dan Pos Jaga Rumah Dinas Wakil Bupati Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rumah Dinas Bupati Sewa Rumah Dinas Forkopimda Sewa Rumah Dinas Wakil Bupati Sumur Bor		6 pkt 1 unit	535.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Unit	535.000.000
4 01 01 2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.009.743.352				1.009.743.352
4 01 01 2,11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati12		12 bulan	152.243.352	Dana yTar,ansfer Umum- ,Dana Alokasi Umum		14 bulan	152.243.352
4 01 01 2,11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas KDH dan WKDH		82 stel	357.500.000	ya, ,		1 Tahun	357.500.000
4 01 01 2,11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran belanja pemeliharaan kesehatan KDH/ WKDH		12 bln	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 bln	100.000.000
4 01 01 2,11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	pembayaran Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati		12 bulan	400.000.000	Dana yTar,ansfer Umum- ,Dana Alokasi Umum		12 bulan	400.000.000
4 01 01 2,12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				247.501.200				247.501.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
4 01 01 2,12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	AC Split AC Unit Alas Meja Besar Bed Cover King Size Karpet Permadani Kursi Tamu Lemari Piring Meja Tamu Peralatan Dapur Sarung Bantal Kursi Sound System Tempat Tidur TV 32 Inch TV 42		8 pkt	87.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit 2 Unit 3 Buah 1 Unit 2 Paket 2 Set 2 Unit 2 Unit 1 Paket 25 Buah 1 Paket 1 Set 1 Unit 2 Unit	87.970.000
4 01 01 2,12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	AC Kasur Kursi Sofa Kursi Tunggu Wakil Bupati Lemari ES Lemari Sepatu Mesin Cuci Peralatan Makan Rice Cooker Tempat Tidur TV 42 inch		1 paket	159.531.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit 1 Unit 1 Set 2 Buah 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 paket 1 Unit 1 unit 1 Unit	159.531.200
4 01 01 2,12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pengadaan sofa 1 unit, tempat tidur 1 unit, gorden 1 pkt, kulkas 1 unit, televisi 1 unit, bed cover 1 unit, lemari pakaian 1 unit		1 paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 paket	0
4 01 01 2,13	Penataan Organisasi				150.000.000				150.000.000
4 01 01 2,13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Ranperda tentang Evaluasi Perangkat Daerah tersusunnya dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah tersusunnya dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah		0 dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	50.000.000			0 dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	50.000.000
4 01 01 2,13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	tersusunnya dokumen standar pelayanan perangkat daerah		0 Dokumen	50.000.000			0 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021 Sebelum Perubahan				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021 Setelah	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
4 01 01 2,13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten tersusunnya laporan kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Tahun n		0 dokumen 0 dokumen	50.000.000			0 dokumen 0 dokumen	50.000.000
4 01 01 2,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				4.450.000.000				4.450.000.000
4 01 01 2,14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah pelayanan keprotokolan terhadap KDH/WKDH, 1 Unit Laptop, Camera 1 Unit Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Terlaksananya kunjungan/ inspeksi KDH/ WKDH di dalam daerah		0 kali 1 thn 1 thn	2.951.384.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 kali 1 thn 1 thn	2.951.384.000
4 01 01 2,14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dialog KDH/WKDH dengan masyarakat		0 kali	48.616.000			0 kali	48.616.000
4 01 01 2,14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah serta Pembangunan, Pemeliharaan Videotron 5 kali Jumlah Peliputan KDH /WKDH baik dalam daerah maupun luar daerah Jumlah Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa Jumlah Sarana Informasi kegiatan pimpinan serta pembangunan daerah		0 dokument 0 kali 0 kali 0 kali	1.450.000.000			a0si dokument 0 kali 0 kali 0 kali	1.450.000.000

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMD Tahun 2016-2021. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya 2021 dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dan Perubahan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021, yang diakhiri dengan penyusunan KUA-PPAS.

Berkenan dengan hal tersebut, maka Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2021 dan menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Dharmasraya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud dari peningkatan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Lebih lanjut dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha dan stakeholder terkait dan dapat dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Demikian Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 ini disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 .

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

